

LAPORAN

KINERJA KPPN SURABAYA I TAHUN ANGGARAN 2020



Gedung Keuangan Negara Surabaya I Lt. IV

Jalan Indrapura No. 5 Surabaya - 60175

Telepon : (031) 3545639 Faksimili : (031) 3523992

Email : 2020.kppnsurabaya1@gmail.com,

Website : <http://www.djbn.kemenkeu.go.id/kppn/surabaya1/>

KATA PENGANTAR

KPPN Surabaya I mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai instansi pemerintah, KPPN Surabaya I berkomitmen mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), yang salah satu implementasinya tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 yang mengamanatkan agar setiap instansi pemerintah menyusun Laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi.

Di samping itu, jika dikaitkan dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*), setiap unit penyelenggara negara harus dapat mempertanggungjawabkan berbagai kinerja yang diraih dikaitkan dengan penyediaan anggaran yang dialokasikan serta pencapaian visi misi organisasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, KPPN Surabaya I menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja yang berisi capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam tahun 2020 sebagai bentuk keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja serta pelaksanaan program dan kegiatan KPPN Surabaya I.

Laporan Kinerja KPPN Surabaya I diharapkan secara internal dapat digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja seiring dengan bertambahnya tantangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di periode selanjutnya. Sedangkan secara eksternal, Laporan Kinerja KPPN Surabaya I diharapkan dapat digunakan sebagai media pertanggungjawaban kepada para *stakeholders*.



Surabaya, 28 Januari 2021
Kepala KPPN Surabaya I


Riskian Lestari
NIP 197103211996032002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i	
Daftar Isi	ii	
Bab I	Pendahuluan	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	1
	C. Peran Strategis	5
	D. Sistematika Laporan	6
Bab II	Perencanaan Kinerja	7
	A. Rencana Strategis	7
	B. Penetapan/Perjanjian Kinerja	11
Bab III	Akuntabilitas Kinerja	17
	A. Capaian Kinerja Organisasi	17
	B. Akuntabilitas Keuangan	32
	C. Kinerja Lainnya	33
Bab IV	Penutup	35

Lampiran:

- 1) Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three* KPPN Surabaya I Tahun 2020
- 2) Raw Data dan Laporan Capaian IKU Kemenkeu-*Three* KPPN Surabaya I Tahun 2020
- 3) Laporan Realisasi Anggaran KPPN Surabaya I Tahun 2020
- 4) Rencana Kerja dan Kalender Kegiatan KPPN Surabaya I Tahun 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) merupakan ujung tombak pelaksanaan anggaran di daerah yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam percepatan pembangunan di Indonesia. Untuk mendukung peran tersebut KPPN harus memiliki rencana strategis berisi visi, misi dan tujuan strategis serta target kinerja yang jelas dan terukur. Rencana strategis diturunkan dalam Sasaran Strategis yang kemudian dipetakan dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi dalam mewujudkan visi dan misi. Peta strategis dituangkan dalam Kontrak Kinerja yang dibuat setiap tahun dan ditandatangani oleh Kepala KPPN serta disetujui oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Selain peta strategis, pada Kontrak Kinerja juga terdapat Pernyataan Kesanggupan, Rincian Target Kinerja, Inisiatif Strategis, Sasaran Kinerja Pegawai yang harus dicapai dalam periode tertentu.

Kontrak kinerja digunakan sebagai alat untuk mengukur capaian kinerja untuk setiap periode tertentu. Sedangkan Kinerja adalah hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama periode tertentu. Berkaitan dengan hal tersebut dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis KPPN Surabaya I sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, maka KPPN Surabaya I menyusun Laporan Kinerja Tahun 2020.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara merupakan hal yang mutlak yang harus dimiliki oleh KPPN sebagai instansi pemerintah dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat. Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk mendorong peningkatan kualitas layanan KPPN Surabaya I kepada para pemangku kepentingan dalam rangka pengelolaan keuangan negara secara profesional, efisien dan efektif telah diterapkan *quality assurance* melalui program sertifikasi berstandar internasional (ISO) 9001:2008 sejak Bulan April 2015 dan program sertifikasi berstandar internasional (ISO) 9001:2015 sejak 12 April 2018.

ISO 9001:2008 merupakan proses pengelolaan organisasi (perencanaan, penerapan, evaluasi dan penyempurnaan) yang ditujukan untuk menghasilkan output yang sesuai dan terstandar dengan harapan memenuhi kebutuhan pelanggan/ pengguna/stakeholder. Sedangkan untuk ISO 9001:2015 menambahkan manajemen resiko dalam proses pengelolaan organisasi.

Pencapaian sertifikasi ISO 9001:2008 dan ISO 9001:2015 tersebut merupakan wujud komitmen seluruh pegawai KPPN Surabaya I dalam rangka menjaga kualitas layanan dan sistem pengendalian internal. Sertifikasi ISO bukan merupakan standar yang menjadi acuan penilaian mutu pelayanan oleh masyarakat luas, tetapi menjadi salah satu indikator pemenuhan kinerja pelayanan kepada para pemangku kepentingan.

Secara umum, tugas pokok KPPN Surabaya I adalah sebagai berikut :

1. Pengujian terhadap dokumen surat perintah membayar berdasarkan peraturan perundang – undangan;
2. Penerbitan surat perintah pencairan dana dari kas negara atas nama Menteri Keuangan (BUN);
3. Penyaluran pembiayaan atas beban APBN;
4. Penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah disalurkan;
5. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari kas negara;
6. Pengiriman dan penerimaan kiriman uang;
7. Penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
8. Penyusunan laporan realisasi pembiayaan yang berasal dari pinjaman dan hibah luar negeri;
9. Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
10. Penyelenggaran verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi;
11. Pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan;
12. Pelaksanaan Kehumasan;
13. Melaksanakan Administrasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-262/PMK.05/2016, tugas pokok dan fungsi masing-masing unit eselon IV adalah sebagai berikut:

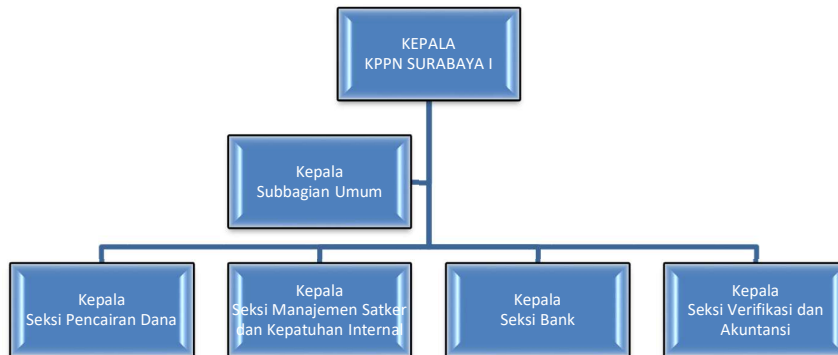
1. **Seksi Pencairan Dana** pada KPPN Surabaya I (Tipe A1) mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. Melakukan pengujian resume tagihan dan SPM dan Penerbitan SP2D;
 - b. Penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum;
 - c. Penerbitan Surat Tanggapan Koreksi;

- d. Melakukan pengelolaan data kontrak, data *supplier*, dan belanja pegawai satker;
 - e. Melakukan pengesahan hibah langsung bentuk uang;
 - f. Monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran satker.
2. **Seksi Bank** mempunyai tugas dan fungsi :
- a. Melakukan penyelesaian transaksi pencairan dana;
 - b. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - c. Fungsi pengelolaan kas (*cash management*);
 - d. Penerbitan Daftar Tagihan;
 - e. Pengelolaan rekening pemerintah;
 - f. Penatausahaan penerimaan negara;
 - g. Penyelesaian retur;
 - h. Pengujian permintaan pengembalian penerimaan negara;
 - i. Konfirmasi dan koreksi data transaksi penerimaan;
 - j. Fungsi layanan bantuan (*helpdesk*) penerimaan negara;
 - k. Monitoring dan evaluasi bank/pos persepsi;
 - l. Pengelolaan dokumen sumber dan analisis data Penerimaan Pihak Ketiga (PFK);
 - m. Pembinaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
 - n. Supervisi implementasi Sistem Pengelolaan Kas (*Cash Management System*) pada rekening bendahara;
 - o. Monitoring dan evaluasi kredit program.
3. **Seksi Verifikasi dan Akuntansi** mempunyai tugas dan fungsi:
- a. Melakukan verifikasi dokumen pembayaran;
 - b. Rekonsiliasi data laporan keuangan;
 - c. Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) tingkat Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara (UAKBUN) - Daerah;
 - d. Pelaporan realisasi dan analisis kinerja anggaran;
 - e. Pembinaan pertanggungjawaban bendahara;
 - f. Rekonsiliasi data rekening pemerintah;
 - g. Penyusunan laporan saldo rekening pemerintah;
 - h. Pencatatan pengesahan hibah langsung dalam bentuk barang;
 - i. Penerbitan dokumen pengembalian penerimaan.

4. **Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal** mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan perbendaharaan;
 - b. Supervisi teknis Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI);
 - c. Asistensi teknologi informasi dan komunikasi eksternal;
 - d. Melakukan penyelenggaraan fungsi manajemen hubungan pengguna layanan (*customer relationship management*);
 - e. Melakukan pelaksanaan tugas Pembina Pengelola Perbendaharaan (*Treasury Management Representative*);
 - f. Pengelolaan layanan perbendaharaan dan rencana penarikan dana;
 - g. Fasilitasi sertifikasi bendahara;
 - h. Fasilitasi kerjasama dengan pemerintah daerah dan pihak lainnya;
 - i. Monitoring penerimaan dana transfer.

5. **Subbagian Umum** sebagai *supporting unit* mempunyai tugas pokok dan fungsi berikut:
 - a. Melakukan pengelolaan organisasi;
 - b. Melakukan pengelolaan kinerja;
 - c. Melakukan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM);
 - d. Melakukan pengelolaan keuangan;
 - e. Melakukan penatausahaan akun pengguna (*user*) Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN);
 - f. Melakukan penatausahaan akun pengguna (*user*) Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI);
 - g. Melakukan penyusunan bahan masukan dan konsep Rencana Strategis;
 - h. Melakukan penyusunan bahan masukan dan konsep Rencana Kerja;
 - i. Melakukan penyusunan bahan masukan dan konsep Rencana Kerja Tahunan;
 - j. Melakukan penyusunan bahan masukan dan konsep Penetapan Kinerja (PK);
 - k. Melakukan penyusunan bahan masukan dan konsep Laporan Kinerja (LAKIN) KPPN Surabaya I;
 - l. Melakukan urusan tata usaha;
 - m. Pengelolaan rumah tangga;
 - n. Melakukan penyusunan dan pelaporan beban kerja;
 - o. Implementasi budaya organisasi;
 - p. Melakukan urusan kehumasan dan layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Bagan Struktur Organisasi KPPN Surabaya I Tahun 2020



C. Peran Strategis

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan padanya berdasarkan perencanaan strategik yang dirumuskan sebelumnya.

Pertanggungjawaban dimaksud disampaikan kepada atasan masing-masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang berkewenangan, dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan serta dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I sebagai bagian unsur pelaksanaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan Perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN), penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berusaha untuk menjadi aparat yang mampu menyelesaikan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna dan dapat dipertanggungjawabkan atas keberhasilan / kegagalan visi dan misi yang dibebankan secara transparan.

Untuk mewujudkan pertanggungjawaban tersebut, maka sebagai pelaksanaan instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999, Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja, disusunlah Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I Tahun 2020.

D. Sistematika Laporan

Agar mudah dipahami, Laporan Kinerja KPPN Surabaya I disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a) Bab I Pendahuluan berisi penjelasan umum organisasi, latar belakang penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN), tugas, fungsi dan struktur organisasi, peran strategis dan sistematika penulisan laporan
- b) Bab II Perencanaan Kinerja berisi ringkasan/ikhtisar kontrak kinerja tahun 2020
- c) Bab III Akuntabilitas Kinerja berisi Capaian Kinerja Organisasi tahun 2020, Realisasi Anggaran dan Kinerja Lainnya
- d) Bab IV Penutup berisi uraian simpulan umum atas kinerja organisasi.
- e) Lampiran-lampiran (Kontrak Kinerja Tahun 2020, Rencana Kinerja Tahun 2020, Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2020 dan Dokumen Lainnya)

Dengan sistematika tersebut, diharapkan Laporan Kinerja KPPN Surabaya I ini dapat mudah dipahami khususnya oleh internal KPPN Surabaya I, dan pada umumnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan pihak eksternal lainnya demi berkepentingan bagi terwujudnya tujuan bangsa dan Negara Republik Indonesia.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Visi dan Misi

Visi : “Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara di Daerah yang Profesional, Modern, Transparan, dan Akuntabel”

Misi :

- a. Menjamin kelancaran pencairan dana APBN secara tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah;
- b. Mengelola penerimaan negara secara professional dan akuntabel;
- c. Mewujudkan pelaporan pertanggungjawaban APBN yang akurat dan tepat waktu.

Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan

Keberhasilan kinerja untuk mewujudkan misi dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I sangat ditentukan oleh faktor-faktor kunci sebagai berikut :

1. Cukup tersedianya SDM yang berkompeten;
2. Tersedianya anggaran, sarana dan prasarana yang memadai;
3. Tersedianya peraturan perundangan yang mendukung;
4. Tersedianya sistem teknologi informasi dan komunikasi yang mutakhir;
5. Terciptanya hubungan yang kondusif baik secara internal maupun eksternal.

Agar memperoleh hasil yang maksimal, faktor-faktor penentu keberhasilan diatas perlu selalu dicermati dan dikelola secara benar. Mencermati dan memahami semua peraturan perundangan yang mendukung dengan benar serta dalam pengelolaannya harus menggunakan strategi maupun pemikiran-pemikiran yang rasional, analitis dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk tercapainya tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Dengan menggunakan pendekatan analisis *SWOT* dan memperhitungkan kekuatan maupun kekurangan yang dimiliki maupun peluang dan tantangan/ancaman yang dihadapi maka strategi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I sebagai berikut :

1. Strategi mengoptimalkan kekuatan memanfaatkan peluang yang ada.

- a. Peningkatan kepercayaan pengguna layanan atas layanan yang tepat dan andal dengan memberikan pelayanan yang memenuhi standar layanan minimum oleh SDM yang memiliki kompetensi yang memenuhi syarat untuk memberikan layanan

serta didukung oleh sarana dan prasarana yang modern sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan.

- b. Perkembangan teknologi informasi telah dimanfaatkan dalam proses integralisasi sistem layanan berbasis teknologi informasi untuk memberikan inovasi atas layanan yang diberikan kepada pengguna layanan.
2. *Strategi mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang yang ada.*
 - a. Standarisasi inovasi atas layanan dengan pemanfaatan perkembangan teknologi informasi perlu ditetapkan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan atas pemberian layanan yang tepat dan andal kepada pengguna layanan.
 - b. Program tawaran pendidikan dan pelatihan baik dalam negeri maupun luar negeri untuk SDM KPPN harus dapat dimanfaatkan dengan optimal, untuk mengurangi ketidakmerataan kompetensi pegawai.
 3. *Strategi menggunakan kekuatan untuk mengatasi tantangan.*
 - a. Standar kualitas minimum layanan KPPN, SDM yang kompeten dan memenuhi syarat secara kualitas pemberian layanan kepada pengguna layanan, serta dukungan sarana dan prasarana yang memenuhi standar, akan mampu meningkatkan kepuasan pengguna layanan yang memiliki ekspektasi yang semakin tinggi terhadap pelayanan yang diberikan.
 - b. Implementasi SMM ISO 9001:2015 secara konsisten dan adanya budaya organisasi yang telah terinternalisasi kepada seluruh pegawai di semua level, akan menjadikan KPPN sebagai suatu organisasi yang bersih dan melayani.
 - c. Integralisasi layanan berbasis teknologi dengan sistem keamanan yang terkontrol dengan sangat baik, dapat mencegah terjadinya ancaman dan gangguan dari pihak eksternal.
 4. *Strategi mengurangi kelemahan untuk mengatasi tantangan.*
 - a. Kompetensi pegawai harus ditingkatkan melalui berbagai upaya, seperti diklat, GKM, bimtek, dsb yang tidak hanya terkait tugas di seksi/bagiannya saja, tapi juga di seksi yang lain. Dengan demikian, seluruh pegawai dapat memberikan layanan yang mampu memenuhi ekspektasi pengguna layanan.
 - b. Sarana dan prasarana yang sesuai standar kualitas minimum yang mampu mendukung proses pelayanan, baik yang sifatnya langsung maupun yang tidak langsung, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan yang diberikan KPPN.
 - c. Pengelolaan organisasi harus senantiasa ditingkatkan agar seluruh pegawai (di layer

manapun) dapat menerapkan budaya organisasi yang bersih dan melayani.

Tujuan KPPN Surabaya I

Berdasarkan misi dan visi tersebut dirumuskan bahwa tujuan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I merupakan hasil akhir yang akan dicapai yaitu :

1. Terwujudnya pengelolaan dan pembinaan pelaksanaan anggaran negara kepada kementerian negara/lembaga;
2. Terselenggaranya percepatan penyajian laporan pelaksanaan anggaran;
3. Tercapainya alokasi subsidi yang tepat sasaran;
4. Tersalurkannya dana APBN sesuai ketentuan;
5. Terwujudnya penatausahaan PNBK;
6. Terbukukannya seluruh penerimaan dan pengeluaran APBN;
7. Meningkatnya pelayanan kepegawaian dengan cara meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
8. Tersedianya SDM yang berkualitas;
9. Meningkatnya kualitas perencanaan program dan keuangan, pengelolaan keuangan, dan laporan realisasi keuangan;
10. Terpenuhinya sarana dan prasarana kerja yang memadai; dan
11. Terwujudnya laporan keuangan pemerintah yang tepat waktu, handal, dan transparan.

Sasaran Strategis

Atas dasar tujuan diatas maka dibuat sasaran-sasaran yang akan dicapai secara nyata dalam waktu tahunan yang bersifat spesifik dapat dinilai atau diukur yaitu :

1. Pengelolaan perbendaharaan negara yang akuntabel;
2. Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif dan efisien;
3. Perumusan regulasi dan otorisasi yang optimal;
4. Komunikasi dan edukasi yang berkesinambungan;
5. Pengelolaan kas yang pruden dan optimal;
6. Monev perbendaharaan;
7. Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan tepat waktu;
8. Pengelolaan organisasi dan SDM yang optimal;
9. Pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal.

Sembilan sasaran strategis yang disusun pada tahun 2020 di atas juga disusun berdasarkan empat pendekatan yaitu :

1. *Stakeholders Perspective*

Pendekatan ini merupakan praktik dimana para manajer merumuskan dan menerapkan

proses yang memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan untuk memastikan keberhasilan jangka panjang. Dengan kata lain bahwa untuk mencapai visi organisasi maka harus dipastikan bahwa kebutuhan pemangku kepentingan telah terpenuhi. Diantara pihak pemangku kepentingan dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia, Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Negara/Lembaga. Adapun sasaran strategis pada perspektif ini adalah pengelolaan perbendaharaan negara yang akuntabel.

2. *Customer Perspective*

Berbeda dengan *stakeholders perspective*, *customer perspective* merupakan praktik dimana manajer merumuskan dan menetapkan proses untuk memenuhi kebutuhan pengguna layanan sehingga tercipta kepuasan dan loyalitas pelanggan bagi organisasi. Dengan kata lain bahwa pendekatan ini fokus pada pemenuhan kebutuhan pengguna layanan yaitu Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Adapun sasaran strategis pada perspektif ini adalah birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif dan efisien.

3. *Internal Process Perspective*

Dalam *internal process perspective*, organisasi menilai seberapa besar kemampuan dan sinergi dari setiap unit/bagian organisasi. Untuk mengukurnya manajer perlu secara rutin mengamati bagaimana kondisi internal organisasi. Hal ini untuk memastikan bahwa proses yang berjalan dalam organisasi tetap dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Adapun sasaran strategis pada perspektif ini yaitu :

- a. Perumusan regulasi dan otorisasi yang optimal;
- b. Komunikasi dan edukasi yang berkesinambungan;
- c. Pengelolaan kas yang pruden dan optimal;
- d. Monev perbendaharaan;
- e. Akuntansi dan pelaporan keuangan Negara yang akuntabel, transparan dan tepat waktu.

4. *Learning and Growth Perspective*

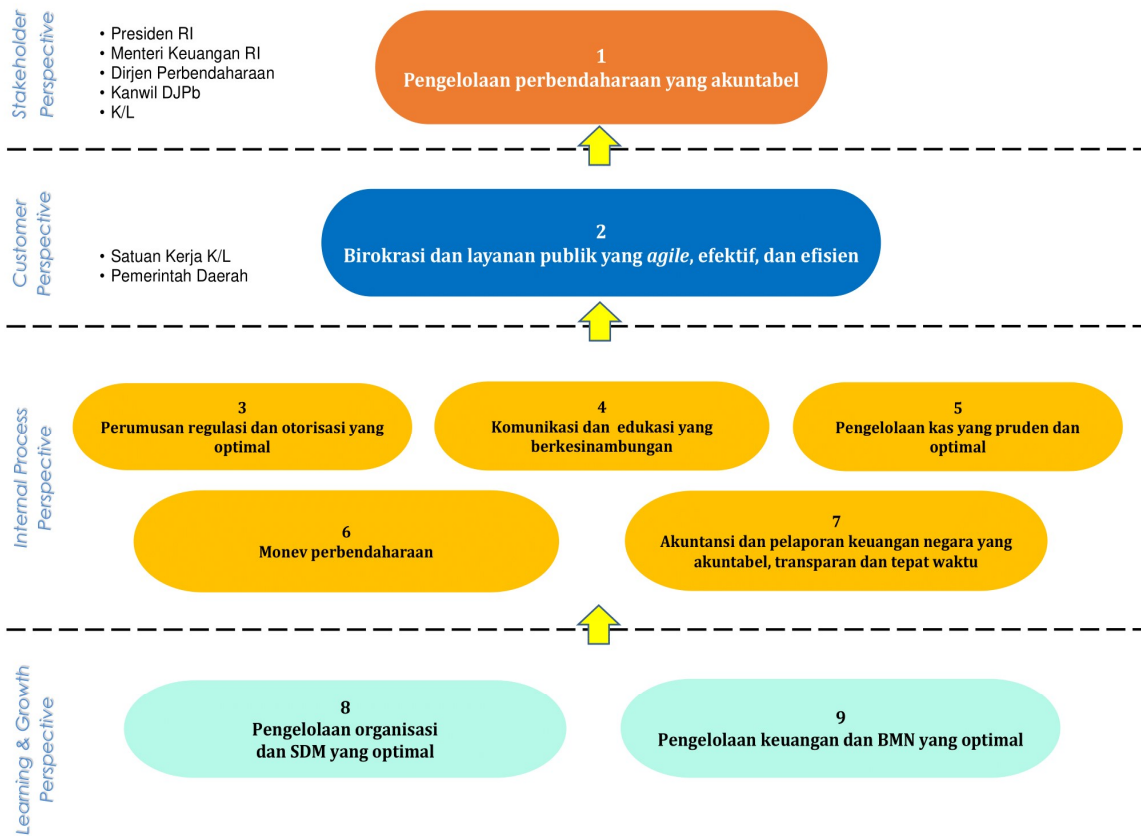
Sumber Daya Manusia (SDM) adalah elemen yang paling penting yang dimiliki oleh organisasi. Proses pertumbuhan dan perkembangan organisasi akan sangat dipengaruhi oleh SDM. Selain itu, organisasi juga harus memperhatikan sistem dan prosedur kerja seperti apa yang diterapkan dalam organisasi. Perlu dipastikan bahwa semua elemen terkontrol dan terkoordinasi dengan baik sehingga tercipta keselarasan antara tujuan

masing-masing dengan tujuan organisasi secara jangka panjang. Adapun sasaran strategis pada perspektif ini yaitu pengelolaan organisasi dan SDM yang optimal, dan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal.

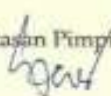

B. Penetapan / Perjanjian Kinerja

KPPN Surabaya I memiliki rencana strategis berisi visi, misi dan tujuan strategis serta target kinerja yang jelas dan terukur. Rencana strategis diturunkan dalam Sasaran Strategis yang kemudian dipetakan dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi dalam mewujudkan visi dan misi. Peta strategis dituangkan dalam Kontrak Kinerja yang dibuat setiap tahun dan ditandatangani oleh Kepala KPPN Surabaya I serta disetujui oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur. Adapun peta strategi dan perjanjian kinerja Kepala KPPN Surabaya I Periode Tahun 2020 ditunjukkan oleh gambar berikut.

Peta Strategi KPPN Surabaya I Tahun 2020



Perjanjian Kinerja Kepala KPPN Surabaya I Tahun 2020

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SURABAYA I			
No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2020
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel	1a-CP Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	88
		1b-N Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN	94
		1c-CP Persentase akurasi perencanaan kas KPPN	80%
2.	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	2a-N Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4,55 (skala 5)
		2b-N Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	3 (skala 4)
3.	Perumusan regulasi dan otorisasi yang optimal	3a-N Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99,4%
4.	Komunikasi dan edukasi yang berkesinambungan	4a-N Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	87
5.	Pengelolaan kas yang prudent dan optimal	5a-N Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	98%
6.	Monev perbendaharaan	6a-CP Nilai kinerja penyaluran DAK dan Dana Desa	80
		6b-CP Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	100%
7.	Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan tepat waktu	7a-N Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98,1%
8.	Pengelolaan organisasi dan SDM yang optimal	8a-N Nilai rata-rata <i>hard competency</i> pegawai	77
		8b-N Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	80
		8c-N Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	83
		8d-N Nilai rata-rata pelaksanaan Literasi Perbendaharaan	74
9.	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal	9a-N Persentase pengelolaan BMN yang optimal	92%
		9b-N Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	81
		9c-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95%
Program/Kegiatan Penyelenggaraan Kuasa Bendahara Umum Negara		Anggaran Rp. 2.300.549.000	
Atasan Pimpinan Unit Kerja, 		Surabaya, 30 Januari 2020 Pimpinan Unit Kerja 	
Dedi Sopandi NIP 196204241982101001		Faradita Arbi NIP 196312101988032001	

Sasaran Kerja Pegawai Tahun 2020

No	KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	AK	TARGET			
			KUANTITAS/ OUTPUT	KUALITAS/ MUTU	WAKTU	BIAYA
1	Meningkatkan nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	-	88	100	12 bln	-
2	Mewujudkan Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas	-	94	100	12 bln	-
3	Mewujudkan akurasi perencanaan kas KPPN	-	80%	100	12 bln	-
4	Mewujudkan kepuasan satker terhadap layanan KPPN	-	4,55 (skala 5)	100	12 bln	-
5	Mewujudkan pengelolaan pengeluaran kas yang efektif	-	3 (skala 4)	100	12 bln	-
6	Mewujudkan penyelesaian SP2D secara tepat waktu	-	99,4%	100	12 bln	-
7	Mewujudkan efektivitas edukasi dan komunikasi	-	87	100	12 bln	-
8	Mewujudkan LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	-	98%	100	12 bln	-
9	Memenuhi nilai kinerja penyaluran DAK dan Dana Desa	-	80	100	12 bln	-
10	Mewujudkan pelaksanaan implementasi Aplikasi SAKTI	-	100%	100	12 bln	-
11	Mewujudkan rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	-	98,1%	100	12 bln	-
12	Mewujudkan nilai rata – rata <i>hard competency</i> pegawai KPPN yang baik	-	77	100	12 bln	-
13	Mewujudkan nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal yang baik	-	80	100	12 bln	-
14	Memenuhi nilai pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i> yang berkualitas	-	83	100	12 bln	-
15	Mewujudkan nilai rata-rata pelaksanaan literasi perbendaharaan yang baik	-	74	100	12 bln	-
16	Mewujudkan pengelolaan BMN yang optimal	-	92%	100	12 bln	-
17	Mewujudkan nilai LK tingkat UAKPA dan UAKPB yang berkualitas	-	81	100	12 bln	-
18	Mewujudkan pelaksanaan anggaran di KPPN yang berkualitas	-	95%	100	12 bln	--

Perbandingan Target Kinerja Tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2020	
1	Pengelolaan perbendaharaan negara yang akuntabel	1a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	75%	80%	88	88
		1b-N	Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas	93	93	94	94
		1c-CP	Persentase akurasi perencanaan kas	-	-	-	80%
2	Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif dan efisien	2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4,12	4,52	4,53	4,55
		2b-N	Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	-	-	-	3
3	Perumusan regulasi dan otorisasi yang optimal	3a-N	Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99%	99%	99,4%	99,4%
4	Komunikasi dan edukasi yang berkesinambungan	4a-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	85	85	86	87
5	Pengelolaan kas yang pruden dan optimal	5a-N	Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	96%	97%	97,5%	98%
6	Monev perbendaharaan	6a-CP	Nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa	-	70	75	80
		6b-CP	Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	-	90%	95%	100%
7	Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu	7a-N	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	97%	98%	98,1%	98,1%
8	Pengelolaan organisasi dan SDM yang optimal	8a-N	Nilai rata-rata <i>hard competency</i> pegawai	75	77	77	77
		8b-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	-	-	75	80
		8c-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	79	81	83	83
		8d-N	Nilai rata-rata pelaksanaan literasi perbendaharaan	-	70	72	74
9	Pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	9a-N	Persentase pengelolaan BMN yang optimal	90%	91%	92%	92%
		9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	-	-	-	81
		9c-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95%	95%	95%	95%

Dari 18 Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Kontrak Kinerja Kepala KPPN Surabaya I tahun 2020, terdapat 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) baru dan 7 Indikator Kinerja Utama (IKU) ditingkatkan targetnya dari target pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan komitmen KPPN Surabaya I meningkatkan kualitas kerjanya dalam memberikan pelayanan yang prima untuk memenuhi kebutuhan pengguna layanan pada khususnya dan pemangku kepentingan lain

pada umumnya. Satu diantara ketiga IKU baru tersebut adalah IKU yang memang baru diukur dan ditargetkan pada tahun 2020 ini yaitu Nilai Kualitas LK Tingkat UAKPA dan UAKPB, sedangkan dua IKU lainnya merupakan penyempurnaan/perubahan atas satuan pengukuran dan formula perhitungannya. Kedua IKU tersebut yaitu Persentase Akurasi Perencanaan Kas dan Indeks Efektivitas Pengelolaan Pengeluaran Kas. Adapun tujuh IKU yang targetnya ditingkatkan yaitu :

1. Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN
Target yang harus dicapai untuk IKU ini pada tahun 2020 adalah sebesar 4,55, mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 4,53.
2. Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi
Target yang harus dicapai untuk IKU ini pada tahun 2020 adalah sebesar 87, mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 86.
3. Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu
Target yang harus dicapai untuk IKU ini pada tahun 2020 adalah sebesar 98%, mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 97,5%.
4. Nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
Target yang harus dicapai untuk IKU ini pada tahun 2020 adalah sebesar 80, mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 75.
5. Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI
Target yang harus dicapai untuk IKU ini pada tahun 2020 adalah sebesar 100%, mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 95%.
6. Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal
Target yang harus dicapai untuk IKU ini pada tahun 2020 adalah sebesar 80, mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 75.
7. Nilai rata-rata pelaksanaan literasi perbendaharaan
Target yang harus dicapai untuk IKU ini pada tahun 2020 adalah sebesar 74, mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 72.

Terdapat Indikator yang target pada tahun 2020 masih sama dengan target pada tahun 2019. Hal ini karena target tersebut dinilai masih sangat menantang dan rasional untuk dapat dicapai pada tahun anggaran 2020. Indikator Kinerja Utama tersebut yaitu :

1. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L
2. Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN
3. Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu

4. Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara andal dan tepat waktu
5. Nilai rata – rata *hard competency* pegawai
6. Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization*
7. Persentase Pengelolaan BMN yang optimal
8. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN

Walaupun targetnya sama, untuk dapat mencapai target IKU tersebut diperlukan usaha yang tidak mudah. IKU Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L dan IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN misalnya, IKU tersebut dihitung dengan formula yang melibatkan banyak komponen di dalamnya, dimana komponen tersebut merupakan hasil kerjasama banyak pihak. Begitu juga dengan IKU Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu, target yang sangat tinggi yaitu 99,40% mengharuskan koordinasi dan kerjasama yang sangat baik antara Seksi Pencairan Dana dan Seksi Bank dalam memproses SPM yang diajukan oleh satker serta Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal dalam mengedukasi satker.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi KPPN Surabaya I pada Tahun 2020 tertuang pada tabel di bawah ini, yang didetailkan untuk setiap kinerja sasaran strategis organisasi.

Target dan Capaian IKU tahun 2020

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Indeks
1	Pengelolaan perbendaharaan negara yang akuntabel	1a-CP Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	88	94,825	107,76%
		1b-N Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas	94	98,397	104,68%
		1c-CP Persentase akurasi perencanaan kas	80%	97,13%	121,42%
2	Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif dan efisien	2a-N Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4,55	4,64	101,98%
		2b-N Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	3	3,92	130,76%
3	Perumusan regulasi dan otorisasi yang optimal	3a-N Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99,4%	99,93%	100,53%
4	Komunikasi dan edukasi yang berkesinambungan	4a-N Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	87	87,56	100,65%
5	Pengelolaan kas yang pruden dan optimal	5a-N Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	98%	100%	102,04%
6	Monev perbendaharaan	6a-CP Nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa	80	99,92	124,90%
		6b-CP Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	100%	100%	100,00%
7	Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, tepat waktu	7a-N Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98,1%	100%	101,94%
8	Pengelolaan organisasi dan SDM yang optimal	8a-N Nilai rata-rata <i>hard competency</i> pegawai	77	89,38	116,08%
		8b-N Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	80	90,87	113,59%
		8c-N Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	83	88,28	106,36%
		8d-N Nilai rata-rata pelaksanaan literasi perbendaharaan	74	78	105,41%
9	Pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	9a-N Persentase pengelolaan BMN yang optimal	92%	100%	108,70%
		9b-N Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	81	90,90	112,22%
		9c-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95%	95,90%	100,95%

Dengan demikian, Nilai Kinerja Organisasi KPPN Surabaya I Tahun 2020 dapat dihitung sebagaimana pada tabel di bawah ini. Nilai Kinerja Organisasi KPPN Surabaya I Tahun 2020 sebesar 107.56%, mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 105.37% dan tahun 2018 yang sebesar 106.49%.

**Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi
KPPN Surabaya I Tahun 2020**

No	Kode IKU	IKU	Target	Realisasi	Pol	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian IKU/NSS/Np
I Stakeholder Perspektif									27,62%
1 Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel									110,49%
1	1a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	88	94,83	Max	PL	19%	40,43%	107,76%
2	1b-N	Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas	94	98,397	Max	PM	14%	29,79%	104,68%
3	1c-CP	Persentase akurasi perencanaan kas KPPN	80%	97,13%	Max	PM	14%	29,79%	120,00%
II Customer Perspektif									16,38%
2 Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien									109,19%
4	2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4,55	4,64	Max	EM	21%	60,00%	101,98%
5	2b-N	Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	3	3,92	Max	PM	14%	40,00%	120,00%
III Internal Process (100%)									30,91%
3 Perumusan regulasi dan otorisasi yang optimal									100,53%
6	3a-N	Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99,40%	99,93%	Max	PM	14%	100,00%	100,53%
4 Komunikasi dan edukasi yang berkesinambungan									100,64%
7	4a-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	87	87,56	Max	PM	14%	100,00%	100,64%
5 Pengelolaan kas yang pruden dan optimal									102,04%
8	6a-N	Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	98%	100,00%	Max	PM	14%	100,00%	102,04%
6 Monev perbendaharaan									110,00%
9	6a-CP	Nilai Kinerja penyaluran DAK dan Dana Desa	80	99,92	Max	PM	14%	50,00%	120,00%
10	6b-CP	Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	100%	100%	Max	PM	14%	50,00%	100,00%
7 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara yang Akuntabel, Transparan, dan Tepat Waktu									101,94%
11	7a-N	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98,10%	100%	Max	PM	14%	100,00%	101,94%
IV Learning and Growth Perspektif									32,65%
8 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Optimal									110,36%
12	8a-N	Nilai rata-rata hard competency pegawai	77	89,38	Max	PM	14%	25,00%	116,08%
13	8b-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	80	90,87	Max	PM	14%	25,00%	113,59%
14	8c-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>strategy focused organization</i>	83	88,28	Max	PM	14%	25,00%	106,36%
15	8d-N	Nilai rata-rata pelaksanaan Literasi Perbendaharaan	74	78	Max	PM	14%	25,00%	105,41%
9 Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal									107,29%
16	9a-N	Persentase Pengelolaan BMN yang optimal	92%	100,00%	Max	PM	14%	33,33%	108,70%
17	9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	81	90,90	Max	PM	14%	33,33%	112,22%
18	9b-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95%	95,90%	Max	PM	14%	33,33%	100,95%
NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)									107,56%

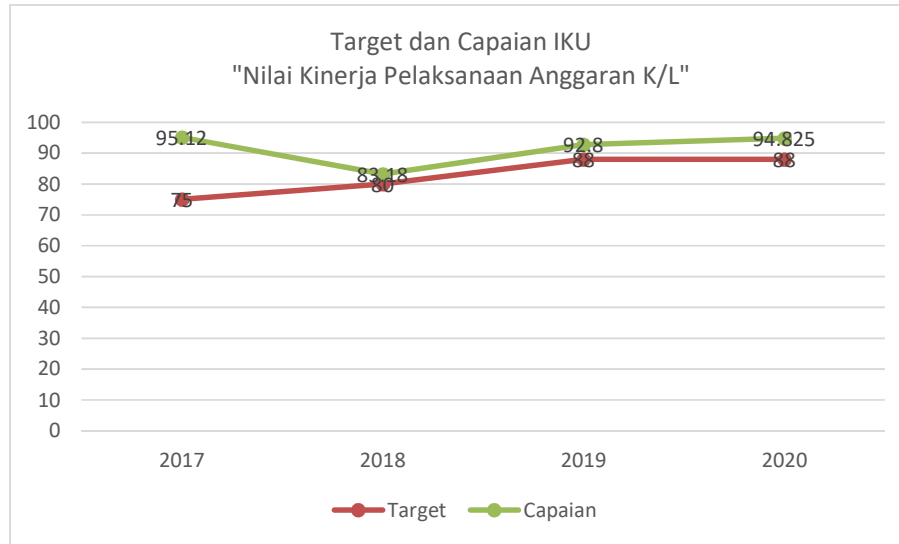
Evaluasi dan Analisis Kinerja Setiap Sasaran Strategis

1. Pengelolaan Perbendaharaan Negara yang Akuntabel

a. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L

Pada kontrak kinerja Kemenkeu-Three KPPN Surabaya I periode tahun 2020, target IKU

IKU Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L sebesar **88**. KPPN Surabaya I mampu meraih capaian realisasi sebesar **94.825** atau sebesar 107.76%. Nilai ini meningkat dari capaian realisasi pada tahun 2019, tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar 92.80, 83,18 dan 95,12 dari target pada tahun 2019, 2018 dan 2017 masing-masing sebesar 88, 80 dan 75.



Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran secara kuantitatif, yang dapat terwakili oleh aspek dan variabel sebagai berikut :

1. Aspek Kesesuaian dengan perencanaan
Variabel : Revisi DIPA (REV), Deviasi Halaman III DIPA (HAL3), Pagu Minus (MIN)
2. Aspek Efektivitas Pelaksanaan Anggaran
Variabel : Retur SP2D (RTR), Penyerapan Anggaran (REAL), Penyelesaian Tagihan (TAG)
3. Aspek Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan
Variabel : Pengembalian/Kesalahan SPM (SPM), Renkas (RPD)
4. Aspek Kepatuhan terhadap regulasi
Variabel : Data Kontrak (KTR), Pengelolaan UP (PUP), Rekon LPJ Bendahara (LPJ), Dispensasi Penyampaian SPM (DSPM).

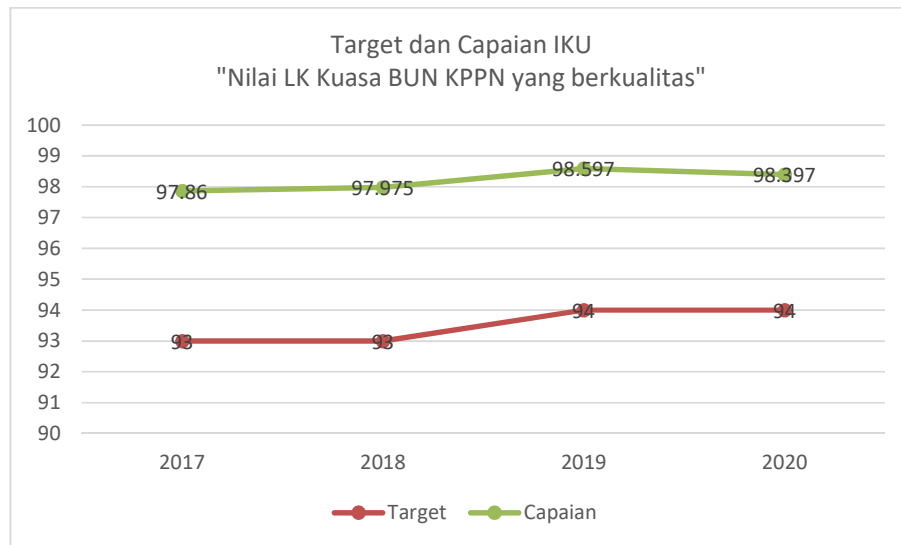
Dari 12 indikator, terdapat 3 indikator yang perlu ditingkatkan lagi yaitu Data Kontrak dan Kesalahan SPM. Kedua indikator tersebut nilainya masih di bawah 88.

KPPN Surabaya I telah melakukan berbagai upaya dalam rangka pencapaian target atas IKU ini, diantara yang telah dilaksanakan antara lain :

- a. Melakukan monitoring terhadap data kontrak dan data supplier.

- b. Melaksanakan sosialisasi terkait IKPA dan sekaligus evaluasi pelaksanaan anggaran.
 - c. Mengelompokkan satker ke dalam cluster-cluster sesuai dengan nilai IKPAnya.
 - d. Melakukan pembinaan melalui berbagai media.
 - e. Menghimbau kepada satker agar mendaftarkan kontrak pada kesempatan pertama.
- b. Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Nomor KEP-122/WPB.16/2020 tanggal 13 November 2020 tentang Penetapan Peringkat Penilaian Laporan Keuangan Tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara Daerah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tahun 2019, nilai kualitas Laporan Keuangan Tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara Daerah KPPN Surabaya I adalah **98,397** atau 104,68% jika dibandingkan target sebesar 94. Capaian ini mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 98,597 namun masih diatas capaian tahun 2018 sebesar 97,975 dan tahun 2017 sebesar 97,86.



- c. Persentase akurasi perencanaan kas

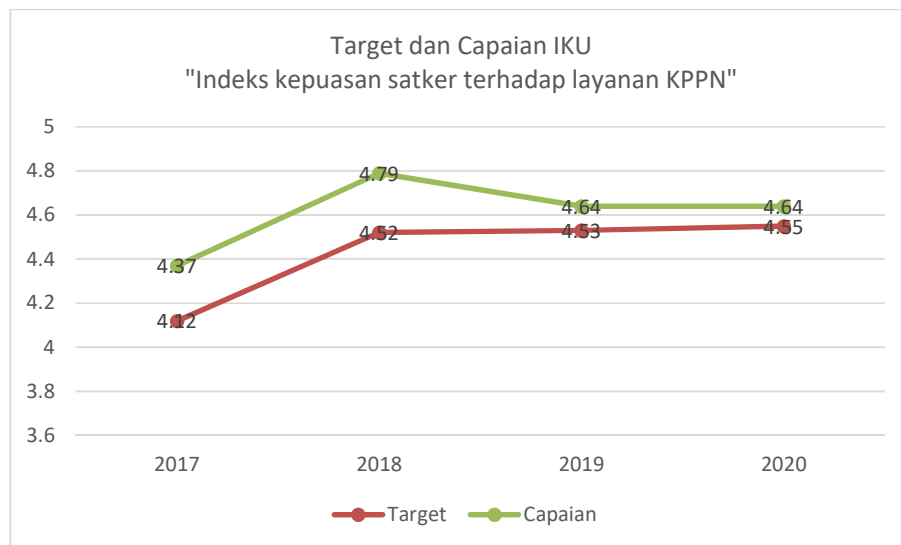
IKU ini merupakan IKU yang baru ada pada tahun 2019. Realisasi IKU ini pada triwulan I, III dan IV adalah N/A. Namun pada triwulan II dapat dihitung dengan realisasi sebesar 97,13% atau 121,42% jika dibandingkan dengan targetnya sebesar 80%.

2. Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif dan Efisien

- a. Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN

IKU Indeks kepuasan satker terhadap layanan dinilai berdasarkan penilaian satker dalam kuesioner kepuasan satker terhadap layanan KPPN yaitu layanan pencairan dana, layanan

rekonsiliasi, layanan bimbingan dan konsultasi, dan layanan konfirmasi surat setoran. IKU ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan yang diberikan KPPN kepada mitra kerja yang meliputi pelaksanaan penerbitan SP2D, pelaksanaan rekonsiliasi, layanan konfirmasi setoran, serta layanan bimbingan dan konsultasi. Pada tahun 2020, KPPN Surabaya I mendapatkan indeks **4,64** atau sebesar 101,98% dari target sebesar 4,55. Capaian ini sama dengan capaian tahun 2019 sebesar 4,64 namun dengan target yang berbeda yaitu 4.53 pada tahun 2019. Target IKU pada tahun 2017 dan 2018 masing-masing 4,12 dan 4,52 dengan capaian pada tahun 2017 dan 2018 masing-masing sebesar 4,37 dan 4,79.



b. Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas

Efektivitas pengeluaran kas KPPN diukur berdasarkan penyaluran dana yang akurat dan kecepatan penyelesaian retur SP2D yang diterbitkan KPPN. Penyaluran dana SP2D yang akurat adalah penyaluran dana SP2D kepada para penerima yang tidak di-retur oleh Bank Operasional. Retur SP2D adalah penolakan/pengembalian pemindahbukuan dan/transfer pencairan dana APBN dari Bank penerima kepada Bank Operasional karena nama, alamat, nomor rekening, dan/atau nama bank yang dituju tidak sesuai dengan data rekening Bank penerima atau rekening penerima tidak aktif.

Kecepatan Penyelesaian Retur yang dilakukan oleh seluruh KPPN di Indonesia untuk meningkatkan pengelolaan pengeluaran APBN dalam rangka meningkatkan pelayanan dengan tepat waktu, tepat jumlah, serta tepat sasaran kepada satuan kerja/stakeholder.

Realisasi capaian IKU ini dihitung dari keakuratan penyaluran dana SP2D dan kecepatan penyelesaian retur. Untuk itu koordinasi antara Seksi Pencairan Dana dan Seksi Bank

dalam memeriksa dan menyelesaikan SPM yang diajukan satker menjadi SP2D serta Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal dalam memberikan edukasi terkait tata cara pengajuan SPM kepada petugas satker.

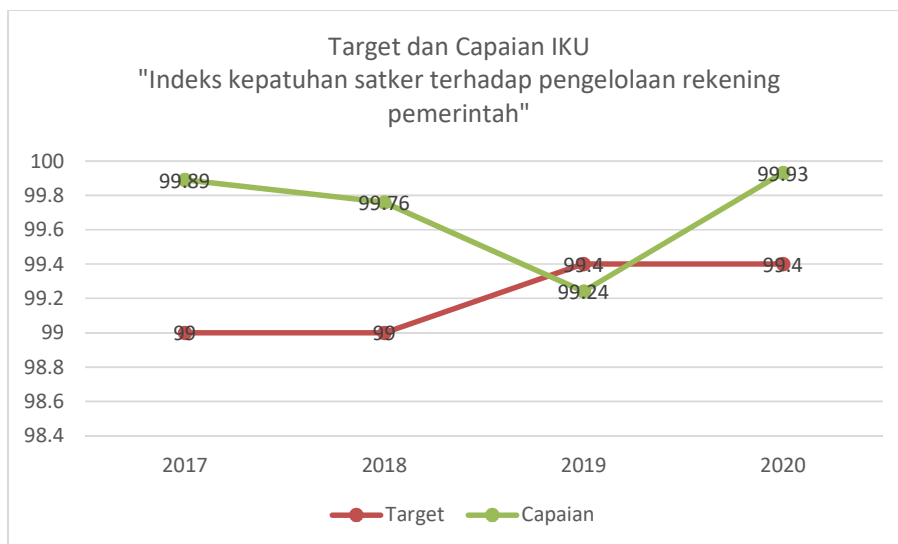
Capaian IKU ini pada tahun 2020 adalah sebesar **3,92** atau 130,76% dari target yang ditetapkan yaitu indeks 3.

3. Perumusan Regulasi dan Otorisasi yang Optimal

a. Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu

SPM Satker yang diproses menjadi SP2D merupakan mekanisme pengujian oleh KPPN yang bersifat formal dan substantif terhadap Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Satuan Kerja untuk diterbitkan menjadi SP2D. Penyelesaian SP2D dinyatakan tepat waktu bila memenuhi janji layanan sebagaimana surat Dirjen Perbendaharaan nomor S-7283/PB.1/2018. SPM satker yang diproses menjadi SP2D secara tepat waktu diukur berdasarkan jumlah penyelesaian SPM Satker yang diproses oleh *Front Office* Seksi Pencairan Dana dan diteruskan ke *Middle Office* Seksi Pencairan Dana untuk selanjutnya diterbitkan SP2D atau *approval* oleh Seksi Bank.

Pada Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three* KPPN Surabaya I Tahun 2020, target yang ditetapkan untuk IKU ini dapat dinyatakan sangat tinggi, yaitu **99,40%** dengan capaian realisasi sebesar **99,93%** atau 100,53% dari target yang ditetapkan. Capaian ini meningkat dari tahun 2019 sebesar 99,24% dengan target 99,40%.

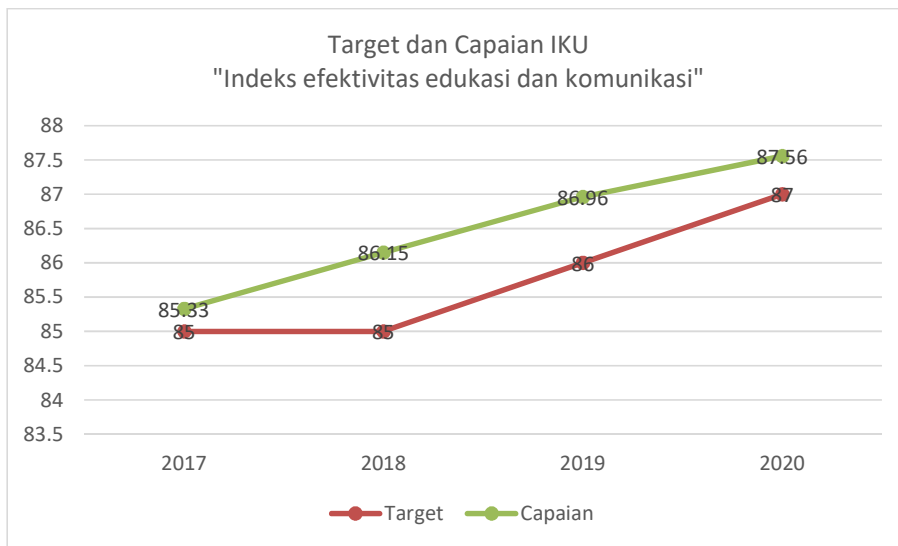


4. Komunikasi dan Edukasi yang Berkesinambungan

i. Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi

IKU yang bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan pembinaan teknis

perbendaharaan yang dilakukan oleh KPPN Surabaya I sebagai Bendahara Umum Negara di daerah kepada satuan kerja mitra KPPN Surabaya I ini, pada tahun 2020 ditetapkan targetnya sebesar 87 dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I berhasil mencapai realisasi **87,56** atau sebesar 100,65% dari target. Capaian tersebut diperoleh dengan upaya yaitu sebelum pelaksanaan sosialisasi/bimtek, tim panitia dan narasumber selalu mengadakan rapat dalam rangka perencanaan kegiatan dimaksud dan pelaksanaan *action plan* IKU Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi berjalan dengan baik. Capaian ini meningkat dari capaian tahun 2019 sebesar 86,96, 2018 sebesar 86,15 dan 2017 sebesar 85,33 dengan target pada tahun 2019, 2018 dan 2017 masing-masing sebesar 86, 85 dan 85.



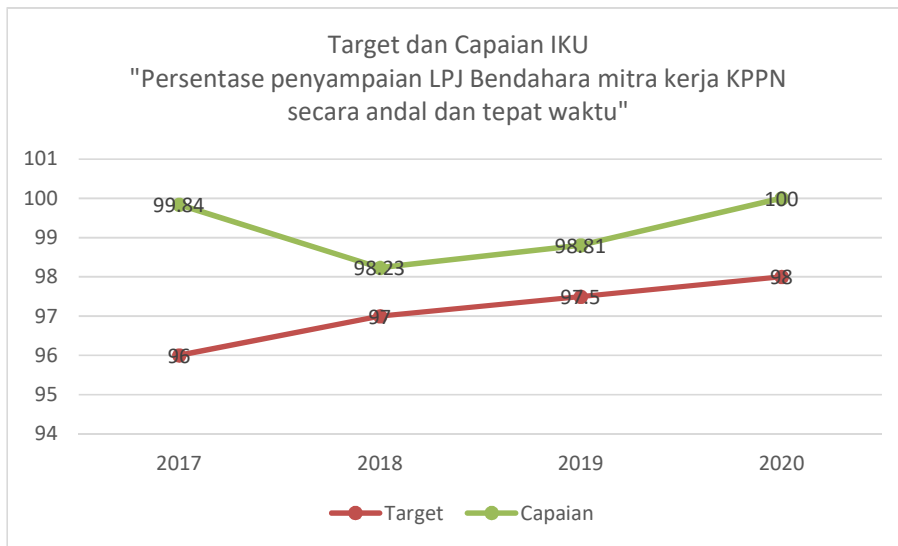
5. Pengelolaan Kas yang Pruden dan Optimal

a. Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara oleh Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN yang menggunakan aplikasi pengelolaan rekening yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan c.q. DJPb. Berdasar Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3303/PB/2018, pengelolaan rekening tersebut menggunakan aplikasi SPRINT (Sistem Pengelolaan Rekening Terintegrasi) sejak 2018. Sebagaimana ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN, penyampaian LPJ bendahara beserta lampirannya kepada KPPN dilaksanakan paling lambat tanggal 10

(sepuluh) setelah bulan yang bersangkutan berakhir. LPJ Bendahara dinyatakan andal jika LPJ tersebut telah diverifikasi dan dinyatakan benar oleh Kuasa BUN KPPN sesuai indikator verifikasi LPJ yang telah ditetapkan.

Pada Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three* KPPN Surabaya I tahun 2020, target IKU ini ditetapkan sebesar **98%** dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I telah mencapai realisasi sebesar **100%** atau sebesar 102,04% dari target. Capaian ini meningkat dari capaian tahun 2019 sebesar 98,81%. Adapun target IKU ini pada tahun 2017, 2018 dan 2019 masing-masing sebesar 96%, 97% dan 97,5%, sedangkan realisasi pada KPPN Surabaya I tahun 2017 dan 2018 masing-masing sebesar 99,84% dan 98,23%. Sosialisasi pemahaman satker terhadap LPJ dan pemberitahuan kepada satker secara rutin terkait batas penyampaian LPJ pada H-3 setiap bulannya serta bimtek aplikasi SILABI yang dilaksanakan merupakan langkah-langkah yang efektif untuk meningkatkan ketertiban satker dalam menyampaikan LPJ sehingga realisasi IKU dapat melebihi target.



6. Monev Perbendaharaan

a. Nilai Kinerja Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Dalam rangka memastikan pelaksanaan anggaran penyaluran DAK fisik dan Dana Desa berjalan dengan efisien dan efektif, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja seluruh stakeholder dalam pelaksanaan anggaran penyaluran DAK fisik dan Dana Desa.

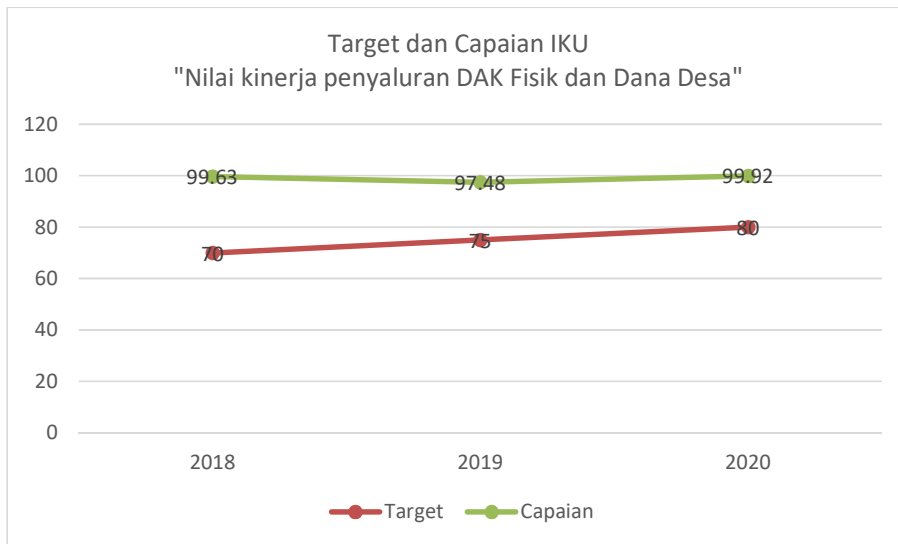
Nilai Kinerja penyaluran DAK fisik dan Dana Desa mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran secara kuantitatif dengan menggunakan formula perhitungan:

$$\text{Realisasi} = [0,10 (\text{SYARAT}) + (0,20 (\text{Proyeksi}) + 0,30 (\text{SSPSM}) + 0,20 (\text{MONEV}) + 0,20 (\text{LK-UAKPA})] \times 100$$

Dengan variabel sebagai berikut :

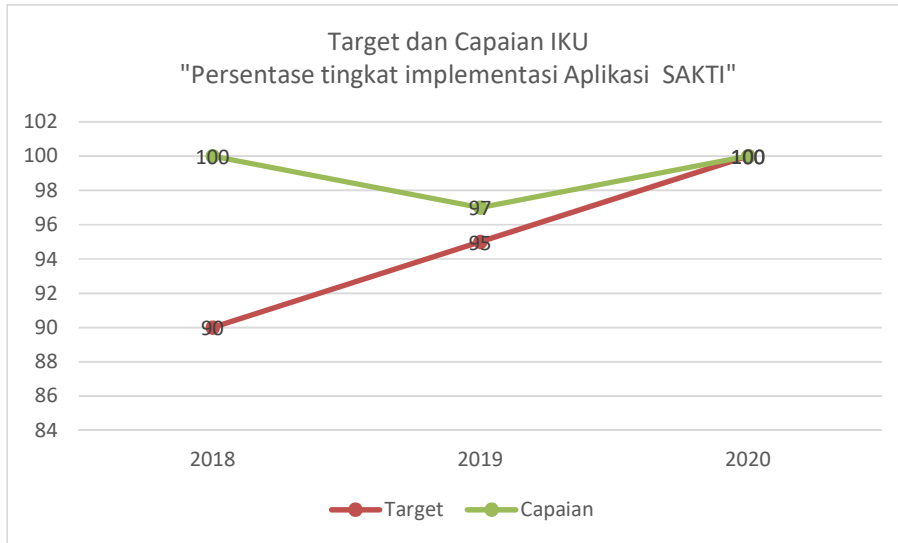
1. Ketepatan waktu penyampaian dokumen persyaratan oleh pemda. (SYARAT)
2. Tingkat akurasi penyusunan proyeksi penyaluran dana transfer DAK Fisik dan Dana Desa oleh KPPN (PROYEKSI).
3. Ketepatan waktu penyelesaian SPP dan SPM penyaluran dana transfer DAK Fisik dan Dana Desa oleh KPPN. (SPPSPM)
4. Ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. (MONEV)
5. Ketepatan waktu penyampaian LK tingkat UAKPA BUN DAK Fisik dan Dana Desa. (LK-UAKPA)

Target IKU ini pada tahun 2020 adalah **80**, meningkat dari tahun 2019 sebesar 75, tahun 2018 sebesar 70. Sedangkan realisasi pada tahun 2020 adalah **99,92** atau sebesar 124,90% dari target. Capaian ini meningkat jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2019 adalah sebesar 97,48 dan tahun 2018 sebesar 99,63.



b. Persentase tingkat implementasi aplikasi SAKTI

IKU ini mengukur tingkat pemenuhan implementasi Aplikasi SAKTI pada tahun 2020 oleh satuan kerja-satuan kerja lingkup Kementerian/Lembaga. IKU yang bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan implementasi Aplikasi SAKTI tahun 2020. Target tahun 2020 ditetapkan sebesar **100%** dan KPPN Surabaya I berhasil mencapai realisasi sebesar **100%**. Capaian IKU ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian IKU pada tahun 2019 sebesar **97%**.



7. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara yang Akuntabel, Transparan, dan Tepat Waktu

a. Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal

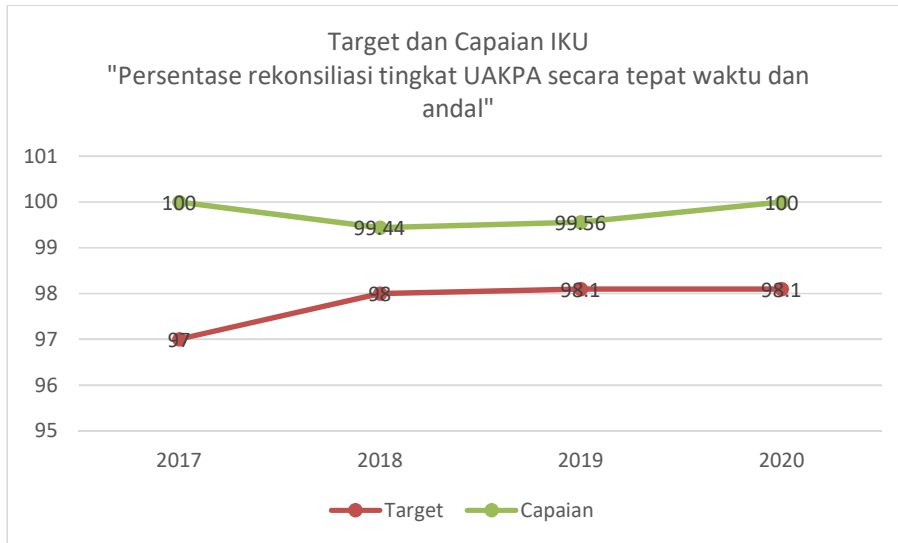
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga, Satuan Kerja selaku UAKPA melakukan rekonsiliasi dengan UAKKBUN-Daerah di wilayah kerjanya setiap bulan. Rekonsiliasi dilakukan dengan menggunakan aplikasi E-Rekon.

Realisasi IKU dihitung berdasarkan perbandingan jumlah satuan kerja yang melakukan rekonsiliasi laporan keuangan secara tepat waktu dengan jumlah satker yang wajib melakukan rekonsiliasi laporan keuangan (bobot 50%) dan perbandingan jumlah satuan kerja yang melakukan rekonsiliasi laporan keuangan secara andal dengan jumlah satker yang wajib melakukan rekonsiliasi laporan keuangan (bobot 50%).

Ketepatan waktu rekonsiliasi yang dihitung berdasarkan jumlah satker yang melakukan upload data ke aplikasi E-Rekon sebelum batas akhir yang ditetapkan. Sedangkan keandalan data hasil rekonsiliasi yang dihitung berdasarkan jumlah satker yang tidak memiliki suspen belanja (ambang batas suspen 0%) sesuai dengan BAR (Berita Acara Rekonsiliasi) yang paling akhir diterbitkan. Selain itu, status BAR sudah ditandatangani oleh KPA dan Kepala Seksi Veraki.

Target IKU ini ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three KPPN Surabaya I tahun 2020 sebesar **98,10%**, dengan nilai realisasi sebesar **100%** atau sebesar 101,94% dari target. Hal tersebut mencerminkan pemahaman satker terhadap rekon dan pentingnya

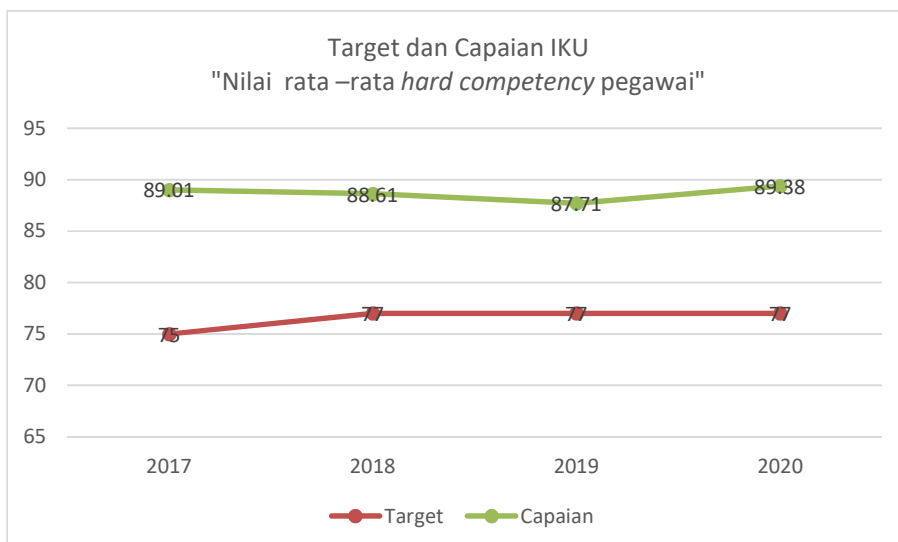
penyampaian ADK secara tepat waktu semakin baik dengan edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh KPPN Surabaya I. Realisasi capaian IKU ini meningkat dari realisasi pada tahun 2019 sebesar 99,56, 2018 sebesar 99,44. Adapun target IKU tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar 98,1% dan 98%.



8. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Optimal

a. Nilai rata-rata *hard competency* pegawai

Dari 29 Pegawai Pelaksana KPPN Surabaya I, diperoleh nilai rata-rata *hard competency* pegawai KPPN Surabaya I pada tahun 2020 adalah **89,38** atau sebesar 116,08% dari target. Nilai ini meningkat dari nilai tahun 2019 sebesar 87,71, tahun 2018 sebesar 88,61 dan tahun 2017 sebesar 89,01. Pencapaian IKU ini mengindikasikan bahwa pemahaman pegawai terhadap tugas pokok dan fungsinya semakin baik.



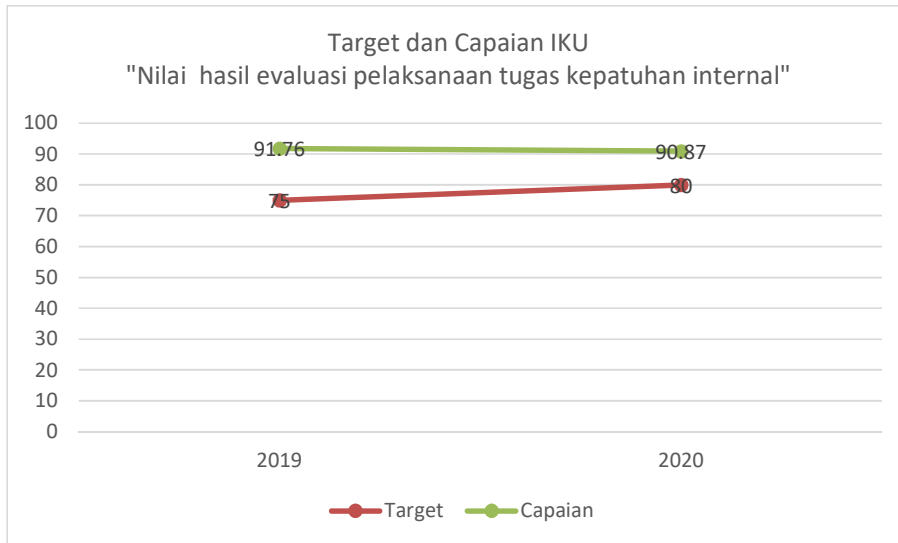
b. Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal

Nilai hasil evaluasi merupakan hasil penilaian terhadap pelaksanaan tugas kepatuhan internal yang diimplementasikan pada unit kerja di lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Penilaian tersebut dilakukan oleh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan c.q. Bidang SKKI.

Unsur-unsur penilaian pelaksanaan tugas kepatuhan internal, terdiri atas:

1. Laporan penerapan manajemen risiko (bobot: 35%)
2. Laporan pemantauan pengendalian intern (bobot: 35%)
3. Laporan pemantauan kode etik dan disiplin pegawai (bobot: 20%)
4. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional dan laporan pengelolaan pengaduan (bobot: 10%).

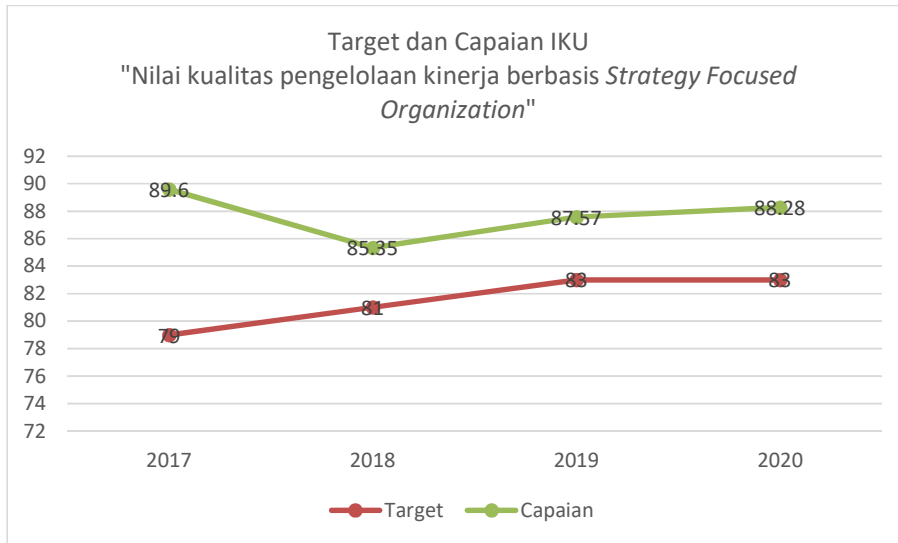
Target yang ditetapkan atas IKU ini pada Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three* KPPN Surabaya I tahun 2020 adalah sebesar 80 dengan realisasi sebesar **90,87** atau 113,59 dari target yang ditetapkan. Capaian IKU ini pada tahun 2020 mengalami penurunan dari capaian tahun 2019 sebesar 91,76.



c. Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization*

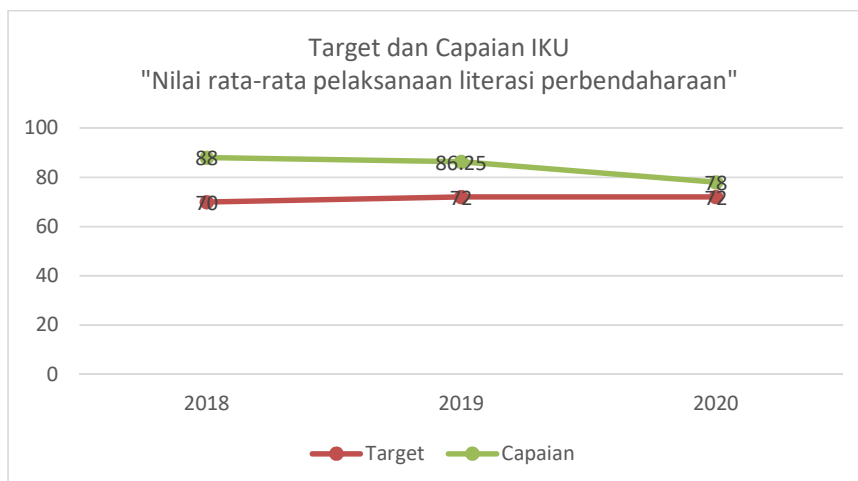
IKU yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pengelolaan kinerja di setiap unit lingkup Ditjen Perbendaharaan ini, pada tahun 2020 ditetapkan targetnya sebesar 83, sama dengan target tahun 2019 namun lebih tinggi dari target tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar 81 dan 79. Adapun realisasi tahun 2020, sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-303/PB/2020 tentang Penetapan Peringkat Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Tahun 2020, KPPN Surabaya I berhasil mencapai target tersebut dengan nilai **88,28** atau sebesar 106,36% dari target. Capaian IKU ini meningkat dari tahun 2019 sebesar 87,57, tahun 2018 sebesar 85,35 dan tahun 2017 sebesar 89,6.



d. Nilai rata-rata pelaksanaan literasi perbendaharaan

IKU ini diwujudkan untuk mendukung implementasi Program Perbendaharaan Menulis yang merupakan program untuk meningkatkan kapasitas literasi para pejabat/pegawai DJPb serta upaya meningkatkan *branding image* DJPb. Implementasi Program Perbendaharaan Menulis mempedomani Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-4/PB/2018 tentang Program Perbendaharaan Menulis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Target IKU ini pada tahun 2020 adalah sebesar 74, sama dengan tahun 2019, dan KPPN Surabaya I berhasil mencapai target tersebut dengan realisasi nilai **78** atau sebesar 105,41%. Capaian IKU ini mengalami penurunan dari capaian tahun 2019 sebesar 86,25.



9. **Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal**

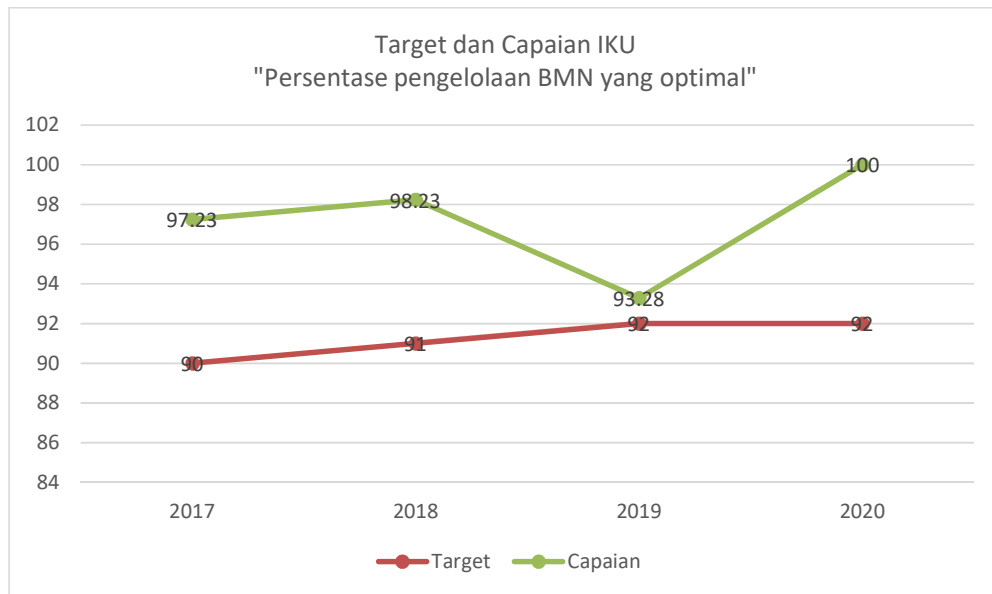
a. Persentase pengelolaan BMN yang optimal

Pengelolaan BMN yang optimal adalah kegiatan perencanaan, penggunaan, penatausahaan dan pengawasan terhadap BMN yang dikuasai, sesuai dengan peruntukan. Dalam rangka peningkatan akurasi data BMN yang dikuasai, dilakukan evaluasi oleh Kantor Pusat berdasarkan komponen akurasi data SIMAN dan SIPAT, dan pemenuhan standar peralatan dan Mesin.

Akurasi data SIMAN dan SIPAT diukur berdasarkan kelengkapan dan validitas data yang telah diinput pada aplikasi SIMAN dan SIPAT, meliputi tanah, Gedung Kantor, Rumah Negara, Kendaraan, dan Peralatan dan Mesin.

Sedangkan, pemenuhan standar peralatan dan mesin diukur berdasarkan tingkat ketersediaan peralatan dan mesin strategis yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pada KPPN Surabaya I. Sfesifikasi dan standar jumlah dari masing-masing jenis BMN mengacu pada Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-32/PB/2016.

Target IKU tahun 2020 yang ditetapkan sebesar 92% dengan realisasi capaian sebesar **100%** atau sebesar 108,70% dari target. Capaian ini mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 93,28% dan tahun 2018 sebesar 98,23% serta 2017 sebesar 97,23%.



b. Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Satuan kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku unit Akuntansi Kuasa Pengguna

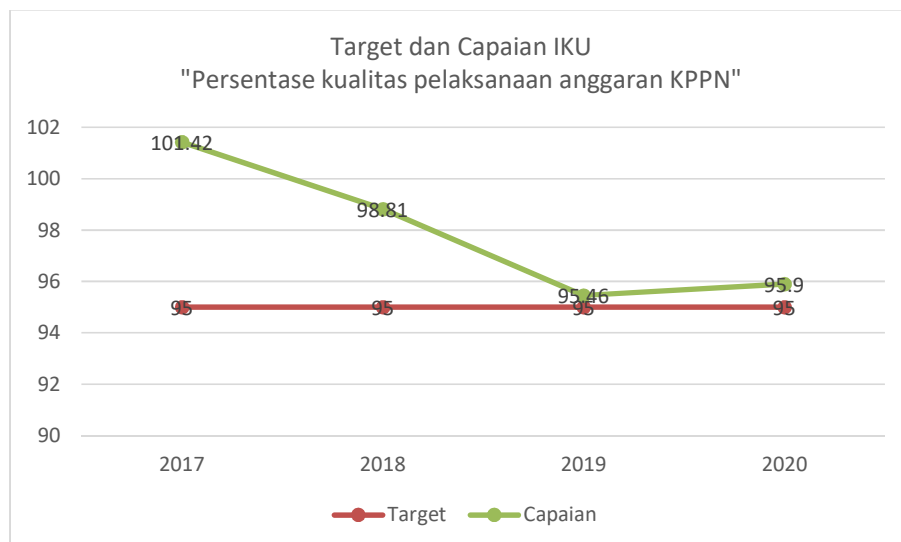
Anggaran (UAKPA) dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan wajib menyampaikan Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) Ditjen Perbendaharaan. IKU ini digunakan untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan dengan dilakukan penilaian laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB yang meliputi kriteria:

- a. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan
- b. keakuratan data laporan keuangan
- c. kepatuhan pelaksanaan anggaran
- d. Penyajian Laporan Keuangan
- e. Partisipasi dan
- f. Laporan BMN.

Tergat yang ditetapkan untuk IKU baru di tahun 2020 ini sebesar 81, dan realisasi capaian KPPN Surabaya I atas IKU ini sebesar **90,90** atau 112,22% dari target.

c. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN

Target IKU “Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN” pada Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three* KPPN Surabaya I tahun 2020 ditetapkan sebesar **95%**. Sedangkan realisasi yang berhasil dicapai KPPN Surabaya I atas IKU ini adalah **95,90%** atau sebesar 100,95% dari target. Capaian tahun 2020 ini meningkat dari tahun 2019 sebesar 95,46%. Dari seluruh indikator yang digunakan untuk mengukur IKU ini, hanya satu indikator yaitu kesalahan SPM yang nilainya masih belum maksimal.



B. Akuntabilitas Keuangan

Pada tahun 2020 KPPN Surabaya I memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 2.300.549.000,- untuk mendanai seluruh kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPPN Surabaya I sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah. Pagu yang tertera pada Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three* tahun 2020 tersebut merupakan pagu pada awal tahun 2020, dan mengalami dua kali efisiensi sehingga berkurang menjadi Rp. 1.985.951.000,-. Dari angka tersebut, realisasi belanja yang dilakukan oleh KPPN Surabaya I adalah sebesar Rp. 1.904.061.238,- atau sebesar 95,88%. Adapun pagu anggaran dan realisasi tersebut jika dikelompokkan ke dalam jenis belanja akan terlihat sebagaimana tabel berikut :

Realisasi Anggaran
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I Tahun 2020

Uraian	Anggaran	Realisasi	Realisasi di atas di (bawah) anggaran	% Realisasi
Belanja Pegawai	457.652.000	404.711.000	(52.941.000)	88,43
Belanja Barang	1.095.969.000	1.067.625.238	(28.343.762)	97,41
Belanja Modal	432.330.000	431.725.000	(605.000)	99,86
Jumlah Belanja Negara	1.985.951.000	1.904.061.238	(81.889.762)	95,88

Jika di rinci per output, kinerja anggaran KPPN Surabaya I tercermin pada tabel berikut :

Belanja Barang

Ouput		Pagu		Realisasi	
		Volume Output	Rp	Volume Output	Rp
1705.002	Layanan Pelaksanaan Kuasa BUN di Daerah	189 satker	60.302.000	189 satker	50.513.800
1705.003	LKPP Tingkat Kuasa BUN	8 Laporan	3.751.000	8 Laporan	1.834.000
1705.994	Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan	1.404.274.000	12 Bulan Layanan	1.337.763.958

Belanja Modal

Ouput		Pagu		Realisasi	
		Volume Output	Rp	Volume Output	Rp
1705.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal - Pengadaan kendaraan dinas operasional roda 4 - Pengadaan peralatan dan mesin	1 layanan	432.330.000	1 layanan	431.725.000

C. Kinerja Lainnya

Selain target Kinerja Utama KPPN Surabaya I Tahun 2020 sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three* KPPN Surabaya I dapat dicapai oleh KPPN Surabaya I, pada tahun 2020 KPPN Surabaya I juga telah menunjukkan komitmen tinggi dalam meningkatkan kinerja dan mendukung program pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good governance*) melalui berbagai kegiatan, diantaranya yaitu :

1. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas sebagai langkah menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

KPPN Surabaya I menunjukkan komitmen tinggi untuk menjadi instansi pemerintah yang bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta suap dan gratifikasi dengan melakukan akselerasi pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur atas Laporan Akhir Pelaksanaan Akselerasi ZI melalui Lembar Kerja Evaluasi KPPN Surabaya I periode tahun 2020 bahwa KPPN Surabaya I mendapatkan nilai 93 dari nilai standar tertinggi yaitu 100.

2. Memperoleh Sertifikat ISO 9001:2015 Quality Management System sejak April 2018. Melalui sertifikasi manajemen mutu ISO 9001:2015, KPPN Surabaya I senantiasa melakukan upaya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik kepada satuan kerja mitra KPPN Surabaya I dan *stakeholders* lainnya. Sertifikat manajemen mutu ISO 9001:2015 ini diperoleh melalui proses yang juga tidak mudah, bahwa *surveyor* harus benar-benar yakin bahwa KPPN Surabaya I telah tertib dan disiplin secara administrasi dan pemenuhan dokumen.
3. KPPN Surabaya I mendukung program pengarusutamaan gender yang dicanangkan oleh Kementerian Keuangan melalui beberapa inovasi terkait implementasi program ini, diantaranya adalah menyediakan ruang laktasi dan bermain anak, menyediakan layanan bebas antri khusus untuk ibu hamil dan petugas satker yang membawa balita.
4. KPPN Surabaya I juga menunjukkan komitmen untuk mendukung program *go green* dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan dan penyelamatan bumi. Diantara yang telah dilakukan KPPN Surabaya I dalam program ini ialah kegiatan penghematan energi, penghematan kertas dan penghematan air serta pengurangan sampah (terutama sampah plastik) dan penanaman pohon dan penghijauan di lingkungan kantor.
5. Setiap tahun KPPN Surabaya I menyelenggarakan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia dan berkomitmen untuk menjadi instansi yang anti dengan praktik suap, gratifikasi dan korupsi.

6. Dimulai pada tahun 2018, KPPN Surabaya I melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan kemampuan pegawai di bidang literasi. Pada tahun 2020, KPPN Surabaya I telah secara rutin mengirimkan literasi untuk dimuat sebagai berita di media lokal, baik cetak maupun elektronik.
7. Melalui peringatan Hari Bakti Perbendaharaan, KPPN Surabaya I melakukan kegiatan-kegiatan sosial seperti Perbendaharaan Berbagi, Perbendaharaan Menyapa dan Perbendaharaan Peduli Lingkungan. Juga kegiatan peningkatan sinergi, baik di internal pegawai KPPN Surabaya I maupun dengan melibatkan unit eselon I lain di Kementerian Keuangan.

Pada tahun 2020 KPPN Surabaya I juga telah melaksanakan beberapa inovasi sebagai layanan unggulan KPPN Surabaya I, diantaranya Kelas Pintar Satker 031, Layanan Pengaduan 031 dan Manajer Layanan 031 serta Unit Layanan 031. Kelas Pintar Satker 031 merupakan proses pembelajaran secara interaktif yang dapat diikuti satker dengan materi sesuai dengan kebutuhan (dipilih satker), Layanan Pengaduan 031 adalah satker dapat menghubungi Halo 081 259 188 188 sehingga pengaduan diterima langsung oleh manajer layanan yang bertugas pada hari tersebut. Sedangkan Unit Layanan 031 merupakan penyediaan fasilitas komputer beserta jaringan/internet untuk pelaksanaan pekerjaan terkait rekonsiliasi, SAKTI dan layanan KPPN lainnya.

BAB IV

PENUTUP

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I dalam Tahun 2020 secara umum telah melaksanakan kegiatan dan mencapai target kinerja dengan baik, dan belum menemui masalah yang serius dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pencapaian target beberapa indikator kinerja utama seperti terkait nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L ada beberapa kendala yang masih dihadapi oleh KPPN Surabaya I, antara lain koordinasi dan pembinaan yang perlu ditingkatkan kepada seluruh satuan kerja, terkait perencanaan penganggaran dengan pelaksanaan kegiatan.

Untuk mereduksi kendala-kendala tersebut di atas perlu diupayakan suatu solusi dan strategi guna pencapaian kinerja yang lebih baik. Strategi yang diterapkan antara lain dengan meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan seluruh satuan kerja serta secara terus menerus melakukan pembinaan.

Pada tahun anggaran 2020 ini, pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN juga menyesuaikan keadaan pada masa pandemi Covid-19, namun demikian bukan menjadi kendala dan hambatan yang berarti dalam pencapaian target kinerja.



KONTRAK KINERJA
NOMOR : 031/PB.25/2020

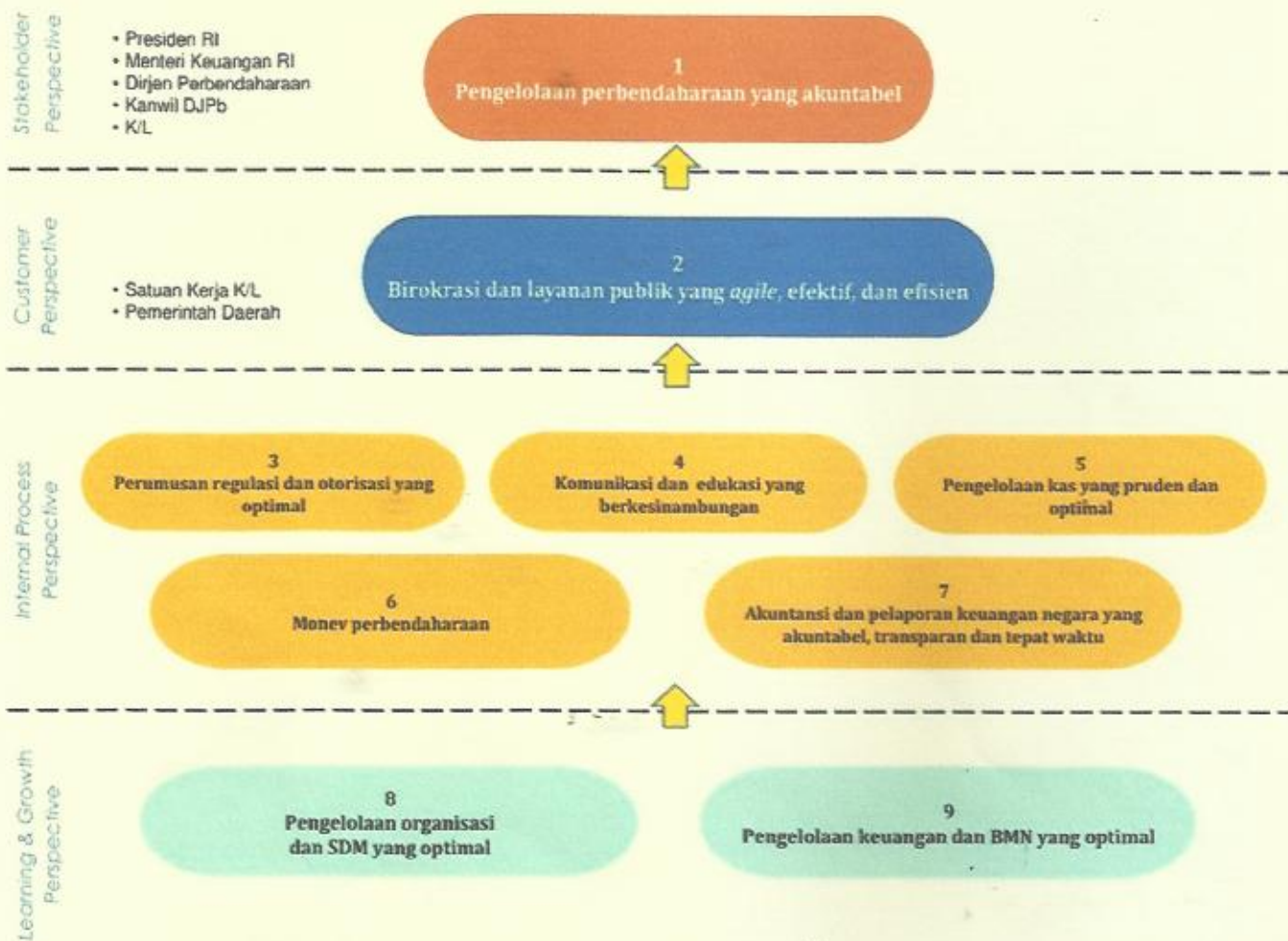
KEPALA KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA SURABAYA I
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2020

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
SURABAYA I

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2020
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel	1a-CP Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	88
		1b-N Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN	94
		1c-CP Persentase akurasi perencanaan kas KPPN	80%
2.	Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif, dan efisien	2a-N Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4,55 (skala 5)
		2b-N Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	3 (skala 4)
3.	Perumusan regulasi dan otorisasi yang optimal	3a-N Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99,4%
4.	Komunikasi dan edukasi yang berkesinambungan	4a-N Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	87
5.	Pengelolaan kas yang pruden dan optimal	5a-N Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	98%
6.	Monev perbendaharaan	6a-CP Nilai kinerja penyaluran DAK dan Dana Desa	80
		6b-CP Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	100%
7.	Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan tepat waktu	7a-N Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98.1%
8.	Pengelolaan organisasi dan SDM yang optimal	8a-N Nilai rata-rata <i>hard competency</i> pegawai	77
		8b-N Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	80
		8c-N Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	83
		8d-N Nilai rata-rata pelaksanaan Literasi Perbendaharaan	74
9.	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal	9a-N Persentase pengelolaan BMN yang optimal	92%
		9b-N Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	81
		9c-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95%

Program/Kegiatan

Penyelenggaraan Kuasa Bendahara Umum Negara

Anggaran


Rp. 2.300.549.000

Atasan Pimpinan Unit Kerja,



Dedi Sopandi
NIP 196204241982101001

Surabaya, 30 Januari 2020
Pimpinan Unit Kerja



Faradiba Arbi
NIP 196312101988032001

**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SURABAYA I
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2020**

Kode SS/ IKU	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
I	Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel							
1a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	88	88	88	88	88	88	88
1b-N	Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN	-	-	-	-	-	94	94
1c-CP	Persentase akurasi perencanaan kas KPPN	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
II	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien							
2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	-	4.55	4.55	-	4.55	-	4.55
2b-N	Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	3 (skala 4)	3 (skala 4)	3 (skala 4)	3 (skala 4)	3 (skala 4)	3 (skala 4)	3 (skala 4)
III	Perumusan regulasi dan otorisasi yang optimal							
3a-N	Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99,4%	99,4%	99,4%	99,4%	99,4%	99,4%	99,4%
IV	Komunikasi dan edukasi yang berkesinambungan							
4a-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	87	87	87	87	87	87	87
V	Pengelolaan kas yang pruden dan optimal							
5a-N	Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%
VI	Monev perbendaharaan							
6a-CP	Nilai kinerja penyaluran DAK dan Dana Desa	80	80	80	80	80	80	80
6b-CP	Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	20%	50%	50%	60%	60%	100%	100%
VII	Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan tepat waktu							
7a-N	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98,1%	98,1%	98,1%	98,1%	98,1%	98,1%	98,1%
VIII	Pengelolaan organisasi dan SDM yang optimal							

Kode SS/ IKU	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
8a-N	Nilai rata-rata <i>hard competency</i> pegawai	-	-	-	-	-	77	77
8b-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	-	-	-	-	-	80	80
8c-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	-	-	-	-	-	83	83
8d-N	Nilai rata-rata pelaksanaan Literasi Perbendaharaan	-	-	-	-	-	74	74
IX	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal							
9a-N	Persentase pengelolaan BMN yang optimal	-	70%	70%	-	70%	92%	92%
9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	-	-	-	-	-	81	81
9c-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%

Surabaya, 30 Januari 2020

PNS yang dinilai,



Faradiba Arbi
Nip 196312101988032001

Sasaran Kerja Pegawai

No	I. PEJABAT PENILAI		No	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	
1	Nama	Dedi Sopandi	1	Nama	Faradiba Arbi
2	NIP	196204241982101001	2	NIP	196312101988032001
3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina Utama Muda (IV/c)	3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina Tk. I (IV/b)
4	Jabatan	Kepala Kantor Wilayah	4	Jabatan	Kepala Kantor
5	Unit Kerja	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur	5	Unit Kerja	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I

No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	AK	TARGET			
			KUANTITAS/ OUTPUT	KUALITAS/ MUTU	WAKTU	BIAYA
1	Meningkatkan nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	-	88	100	12 bln	-
2	Mewujudkan Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas	-	94	100	12 bln	-
3	Mewujudkan akurasi perencanaan kas KPPN	-	80%	100	12 bln	-
4	Mewujudkan kepuasan satker terhadap layanan KPPN	-	4,55 (skala 5)	100	12 bln	-
5	Mewujudkan pengelolaan pengeluaran kas yang efektif	-	3 (skala 4)	100	12 bln	-
6	Mewujudkan penyelesaian SP2D secara tepat waktu	-	99,4%	100	12 bln	-
7	Mewujudkan efektivitas edukasi dan komunikasi	-	87	100	12 bln	-
8	Mewujudkan LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	-	98%	100	12 bln	-
9	Memenuhi nilai kinerja penyaluran DAK dan Dana Desa	-	80	100	12 bln	-
10	Mewujudkan pelaksanaan implementasi Aplikasi SAKTI	-	100%	100	12 bln	-
11	Mewujudkan rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	-	98,1%	100	12 bln	-
12	Mewujudkan nilai rata - rata <i>hard competency</i> pegawai KPPN yang baik	-	77	100	12 bln	-
13	Mewujudkan nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal yang baik	-	80	100	12 bln	-

No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	AK	TARGET			
			KUANTITAS/ OUTPUT	KUALITAS/ MUTU	WAKTU	BIAYA
14	Memenuhi nilai pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i> yang berkualitas	-	83	100	12 bln	-
15	Mewujudkan nilai rata-rata pelaksanaan literasi perbendaharaan yang baik	-	74	100	12 bln	-
16	Mewujudkan pengelolaan BMN yang optimal	-	92%	100	12 bln	-
17	Mewujudkan nilai LK tingkat UAKPA dan UAKPB yang berkualitas	-	81	100	12 bln	-
18	Mewujudkan pelaksanaan anggaran di KPPN yang berkualitas	-	95%	100	12 bln	Rp. 2.300.549.000

Surabaya, 30 Januari 2020

PNS yang dinilai,

Pejabat Penilai,



Dedi Sopandi
NIP 196204241982101001



Faradiba Arbi
NIP 196312101988032001

INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SURABAYA I
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2020

No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Kegiatan	Output	Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
1.	SS: Komunikasi dan edukasi yang berkesinambungan IKU: Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	Optimalisasi transaksi pembayaran non tunai di tingkat KPPN	Meningkatnya pemahaman, kesadaran, dan transaksi pembayaran non tunai tingkat KPPN Target: Minimal 70% satker wajib KPP di tingkat KPPN memiliki besaran proporsi UP Tunai ≤ 60%	Q1: Edukasi penggunaan, keamanan, dan pertanggung-jawaban transaksi non tunai kepada Satker Q2: Monev implementasi Transaksi Pembayaran Non Tunai (KKP) di tingkat KPPN Q3: Koordinasi dengan <i>Stakeholder</i> (Perbankan dan KPP) Q4: Analisis perkembangan transaksi non Tunai dalam pelaksanaan APBN di tingkat wilayah	Q1: Laporan kegiatan Q2: Laporan kegiatan Q3: Laporan kegiatan Q4: Kajian/ Analisis	Januari s.d Desember 2020	Kepala KPPN	-
2.	SS: Pengelolaan organisasi dan SDM yang optimal IKU: Nilai rata-rata <i>hard competency</i> pegawai	Pelaksanaan <i>Coaching and Counseling</i>	Peningkatan kapasitas pegawai	Q1: <i>Coaching and counseling</i> Q2: <i>Coaching and counseling</i> Q3: <i>Coaching and counseling</i> Q4: <i>Coaching and counseling</i>	Q1: 65% Q2: 65% Q3: 65% Q4: 65%	Januari s.d. Desember 2020	Kepala KPPN	-
3.	SS: Komunikasi dan edukasi yang berkesinambungan IKU: Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	Tercapainya TMR KPPN Surabaya I menjadi jabatan fungsional tertutup (Jabatan Fungsional Perbendaharaan)	Dari 5 TMR diharapkan 4 mengikuti jabatan fungsional (kecuali Bendahara Pengeluaran)	Q1 : edukasi tentang jabatan fungsional tertutup kepada seluruh pegawai Q2 : melakukan persiapan untuk mengikuti <i>inpassing</i> jabatan fungsional	Laporan Kegiatan	Januari s.d. Juni 2020	Subbag Umum	-
4.	SS : Monev Perbendaharaan	Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa lebih cepat	Meningkatkan pemahaman dan tanggungjawab	Smt 1 : evaluasi pelaksanaan DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 2019, dan persiapan	Nilai Kualitas/ Laporan	Januari s.d. Desember 2020	Seksi Bank dan Seksi Vera	-

No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory	Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
	IKU : Nilai Kinerja Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa	tanpa menunggu batas akhir	dalam penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa secara tepat sasaran dan tepat waktu	penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa tahap I dan tahap II tahun anggaran 2020 Smt 2 : evaluasi pelaksanaan DAK Fisik dan Dana Desa Tahap I dan II Tahun Anggaran 2020, dan persiapan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa tahap III tahun anggaran 2020			

Surabaya, 30 Januari 2020

PNS yang dinilai,



Faradiba Arbi

NIP 196312101988032001

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Nama Unit : KPPN Surabaya I
 Jabatan : Kepala Kantor
 Periode Pelaporan : Triwulan IV Tahun 2020

No	Uraian IKU	Q1		Q2		Sm. 1		Q3		s.d. Q3		Q4		Y-20	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	88	N/A	88	N/A	88	N/A	88	94,41	88	94,41	88	95,24	88	94,83
2	Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94	98,397	94	98,397
3	Persentase akurasi perencanaan kas KPPN	80%	N/A	80%	97,13%	80%	97,13%	80%	N/A	80%	97,13%	80%	N/A	80%	97,13%
4	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	-	-	4,55	4,64	4,55	4,64	-	-	4,55	4,64	-	-	4,55	4,64
5	Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	3	N/A	3	3,95	3	3,95	3	3,86	3	3,90	3	3,96	3	3,92
6	Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99,4%	N/A	99,4%	99,93%	99,4%	99,93%	99,4%	99,86%	99,4%	99,89%	99,4%	100%	99,4%	99,93%
7	Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	-	-	87	87,04	87	87,04	-	-	87	87,04	87	88,09	87	87,56
8	Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	98%	100%	98%	100%	98%	100%	98%	100%	98%	100%	98%	100%	98%	100%
9	Nilai kinerja penyaluran DAK dan Dana Desa	80	100	80	99,69	80	99,85	80	100,00	80	99,90	80	100,00	80	99,92
10	Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	20%	N/A	34%	34,00%	34%	34,00%	60%	63,00%	60%	63,00%	100%	100%	100%	100%
11	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98,1%	100%	98,1%	N/A	98,1%	100%	98,1%	100%	98,1%	100%	98,1%	100%	98,1%	100%
12	Nilai rata - rata hard competency pegawai KPPN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	89,38	77	89,38
13	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	90,87	80	90,87
14	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	78	74	78
15	Nilai rata-rata pelaksanaan Literasi Perbendaharaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	88,28	83	88,28
16	Persentase pengelolaan BMN yang optimal	-	-	70%	70,00%	70%	70,00%	-	-	70%	70%	92%	100%	92%	100%
17	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	90,90	81	90,90
18	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95%	N/A	95%	N/A	95%	N/A	95%	99,12%	95%	99,12%	95%	92,68%	95%	95,90%

Surabaya, 12 Januari 2021

Menyetujui,
 Kepala Kantor



Dedi Sopandi
 NIP 196204241982101001

Riskian Lesari
 NIP 197103211996032002



RAW DATA IKU KEMENKEU-Three KPPN SURABAYAI
TRIWULAN IV TAHUN 2020

NO	Periode	Kode IKU	Uraian IKU	Data yang diperlukan	Data	Keterangan
1	Triwulanan	1a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	Indeks kinerja revisi DIPA	100,00	<p>Keterangan</p> <p>Hasil penilaian IKPA pada Aplikasi OMS/PAN yang dihitung dengan rumus : $5\% (REV) + 5\% (HAL2) + 5\% (MIN) + 15\% (REAL) + 12\% (TAG) + 10\% (KCD) + 5\% (RTR) + 5\% (RPD) + 5\% (SPM) + 15\% (KTR) + 8\% (PUP) + 5\% (LPJ) + 5\% (OSPM)] \times 100$</p> <p>Sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris DJPB Nomor MD-137/PB-1/2020 tanggal 31 Maret 2020, capaian IKU ini untuk triwulan I tahun 2020 adalah N/A.</p> <p>Sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris DJPB Nomor ND-1975/PB-1/2020 tanggal 30 Juni 2020, capaian IKU ini untuk triwulan II tahun 2020 adalah N/A.</p> <p>Sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris DJPB Nomor ND-3000/PB-1/2020 tanggal 1 Oktober 2020, capaian IKU ini untuk triwulan III tahun 2020 sebagaimana pada Monev/PA menu capaian IKU IKPA (oasis)</p>
				Bobot	5%	
				Nilai kinerja revisi DIPA	5,00	
				Indeks kinerja halaman III DIPA	95,18	
				Bobot	5%	
				Nilai kinerja halaman III DIPA	4,76	
				Indeks kinerja pagu minus	99,81	
				Bobot	5%	
				Nilai kinerja pagu minus	4,99	
				Indeks kinerja penyerapan anggaran	98,85	
				Bobot	15%	
				Nilai kinerja penyerapan anggaran	14,83	
				Indeks kinerja penyelesaian tagihan	98,22	
				Bobot	12%	
				Nilai kinerja penyelesaian tagihan	11,79	
				Indeks kinerja capaian output	95,34	
				Bobot	10%	
Nilai kinerja capaian output	9,53					
Indeks kinerja terkait retur SP2D	99,77					
Bobot	5%					
Nilai kinerja terkait retur SP2D	4,99					
Indeks kinerja penyampaian data RPD	98,49					
Bobot	5%					
Nilai kinerja penyampaian data RPD	4,92					
Indeks kinerja terkait pengembalian SPM	85,00					
Bobot	5%					
Nilai kinerja terkait pengembalian SPM	4,25					
Indeks kinerja terkait data kontrak	85,00					
Bobot	15%					
Nilai kinerja terkait data kontrak	12,75					
Indeks kinerja pertanggungjawaban UP	97,00					
Bobot	8%					
Nilai kinerja pertanggungjawaban UP	7,76					
Indeks kinerja penyampaian LPJ	98,13					
Bobot	5%					
Nilai kinerja penyampaian LPJ	4,91					
Indeks kinerja dispersasi SPM	100,00					
Bobot	5%					
Nilai kinerja Dispersasi SPM	5,00					
Indeks kinerja Dispersasi SPM	95,24					
Bobot	98,397					
Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L	98,397					
Hasil penilaian kualitas LK Kuasa BUN tingkat KPPN yang dilakukan oleh masing-masing Karwil DJPB	98,397	<p>Kategori kualitas nilai LK Kuasa BUN tingkat KPPN : Level 4 = 95-100 (Sangat Baik) Level 3 = 80-94 (Baik) Level 2 = 65-79 (Cukup) Level 1 = 0-64 (Kurang)</p> <p>Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik laporan keuangan yang bersifat historikal report. Untuk realisasi IKU tahun 2020, merupakan hasil penilaian kualitas LK Kuasa BUN KPPN tahun 2019.</p>				
2	Tahunan	1b-N	Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN			

NO	Periode	Kode IKU	Uraian IKU	Data yang diperlukan	Data	Keterangan
3	Triwulanan	1c-CP	Persentase akurasi perencanaan kas KPPN	Deviasi bulan Oktober Deviasi bulan November Deviasi bulan Desember Rata - Rata Deviasi RPD harian KPPN per periode Persentase akurasi perencanaan kas KPPN		Formula perhitungan IKU = 100% - (Rata2 Deviasi RPD harian KPPN per periode) / 3 Selesai dengan NO-3000/PB/12/2020, capaian IKU direvisi untuk periode triwulan III dan IV adalah N/A
4	Tahunan	2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	Indeks hasil survei kepuasan satker	N/A	Indeks Pengukuran menggunakan skala 1-5 : 5 = Sangat Puas 4 = Puas 3 = Cukup Puas 2 = Kurang Puas 1 = Tidak Puas
5	Triwulanan	2b-N	Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	\sum penerima pada SP2D yang diterbitkan \sum penerima pada SP2D yang diretur oleh BO Nilai indeks penyaluran dana SP2D yang akurat Indeks \sum SP2D pengganti dengan kategori indeks 1 \sum SP2D pengganti dengan kategori indeks 2 \sum SP2D pengganti dengan kategori indeks 3 \sum SP2D pengganti dengan kategori indeks 4 \sum SP2D pengganti Indeks kecepatan penyelesaian rekur Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	240874 53 99,98% 4 0 0 6 43 49 3,88 3,96	Formula perhitungan IKU = (70% x nilai indeks Penyaluran dana SP2D yang akurat) + (30% x nilai indeks Kecepatan Penyelesaian Rekur) Indeks Penyaluran dana SP2D yang akurat dihitung dengan formula : \sum Penerima pada SP2D yang diterbitkan - \sum penerima pada SP2D yang diretur oleh BO / \sum penerima pada SP2D yang diterbitkan x 100% Indeks kecepatan penyelesaian rekur SP2D dihitung dengan formula : $(n \text{ SP2D-P-1} - 1) + (n \text{ SP2D-P-2} * 2) + (n \text{ SP2D-P-3} * 3) + (n \text{ SP2D-P-4} * 4) / \sum \text{ SP2D-P}$ $n \text{ SP2D-P-1}$ = jumlah SP2D Pengganti dengan kategori indeks 1 $n \text{ SP2D-P-2}$ = jumlah SP2D Pengganti dengan kategori indeks 2 $n \text{ SP2D-P-3}$ = jumlah SP2D Pengganti dengan kategori indeks 3 $n \text{ SP2D-P-4}$ = jumlah SP2D Pengganti dengan kategori indeks 4 $\sum n \text{ SP2D-P}$ = total jumlah SP2D Pengganti Indeks kecepatan penyelesaian rekur SP2D: 4 = SP2D Pengganti diterbitkan 1-10 HK sejak notifikasi rekur di OMSPAN 3 = SP2D Pengganti diterbitkan 11-15 HK sejak notifikasi rekur di OMSPAN 2 = SP2D Pengganti diterbitkan 16-20 HK sejak notifikasi rekur di OMSPAN 1 = SP2D Pengganti diterbitkan >20 HK sejak notifikasi rekur di OMSPAN
6	Triwulanan	3a-N	Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	\sum SP2D sesuai kriteria yang diterbitkan secara tepat waktu \sum SP2D sesuai kriteria yang diterbitkan oleh KPPN Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu Hasil kuesioner sosialisasi pedoman pelaksanaan anggaran pada akhir tahun anggaran 2020	25566 25566 100,00% 88,09	Formula perhitungan IKU = \sum SP2D sesuai kriteria yang diterbitkan secara tepat waktu / \sum SP2D sesuai kriteria yang diterbitkan oleh KPPN x 100% Bimtek dukur dengan post test sedangkan sosialisasi dengan kuesioner. Jika pada satu periode pelaporan terdapat kegiatan bimtek dan kegiatan sosialisasi, maka total nilai efektivitas edukasi dan komunikasi pada periode tersebut dibobot sebagai berikut: hasil post test 60%, sedangkan hasil kuesioner 40%.
7	Semesteran	4a-N	Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	Rata-rata Indeks Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	88,09	
8	Triwulanan	5a-N	Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	\sum LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu \sum LPJ Bendahara yang seharusnya disampaikan ke KPPN Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	381 381 100%	Formula perhitungan IKU = \sum LPJ Bendahara andal dan tepat waktu / \sum LPJ Bendahara seharusnya disampaikan ke KPPN x 100%
9	Triwulanan	6a-CP	Nilai kinerja penyaluran DAK dan Dana Desa	Indeks ketepatan waktu penyampaian dokumen persyaratan Indeks keakuratan rencana penarikan dana (proyeksi) Indeks ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DFDD Indeks ketepatan waktu penyampaian LK UAKPA BUN DFDD Nilai Kinerja Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa	N/A 30 20 15 20 100,00	Formula perhitungan IKU = $(0,15 \text{ (S/YAKN)} + (0,20 \text{ (PROYEKSI)} + 0,30 \text{ (SPSPFM)} + 0,15 \text{ (MONEY)} + 0,20 \text{ (K-UAKPA)}) \times 100$

NO	Periode Triwulanan	Kode IKU 6b-CP	Uraian IKU Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	Data yang diperlukan	Data	Keterangan
10				<p>Jumlah saiker telah mengikuti Tahap I</p> <p>Jumlah saiker ditetapkan mengikuti Tahap I</p> <p>Proporsi Tahapan I</p> <p>Jumlah saiker telah mengikuti Tahap II</p> <p>Jumlah saiker ditetapkan mengikuti Tahap II</p> <p>Proporsi Tahapan II</p> <p>Jumlah saiker telah mengikuti Tahap III</p> <p>Jumlah saiker ditetapkan mengikuti Tahap III</p> <p>Proporsi Tahapan III</p> <p>Jumlah saiker telah mengikuti Tahap IV</p> <p>Jumlah saiker ditetapkan mengikuti Tahap IV</p> <p>Proporsi Tahapan IV</p> <p>Jumlah saiker telah mengikuti Tahap V</p> <p>Jumlah saiker ditetapkan mengikuti Tahap V</p> <p>Proporsi Tahapan V</p> <p>Jumlah saiker telah mengikuti Tahap VI</p> <p>Jumlah saiker ditetapkan mengikuti Tahap VI</p> <p>Proporsi Tahapan VI</p> <p>Jumlah saiker telah mengikuti Tahap VII</p> <p>Jumlah saiker ditetapkan mengikuti Tahap VII</p> <p>Proporsi Tahapan VII</p> <p>Jumlah saiker telah mengikuti Tahap VIII</p> <p>Jumlah saiker ditetapkan mengikuti Tahap VIII</p> <p>Proporsi Tahapan VIII</p> <p>Jumlah saiker telah mengikuti Tahap IX</p> <p>Jumlah saiker ditetapkan mengikuti Tahap IX</p> <p>Proporsi Tahapan IX</p> <p>Jumlah saiker telah mengikuti Tahap X</p> <p>Jumlah saiker ditetapkan mengikuti Tahap X</p> <p>Proporsi Tahapan X</p> <p>Jumlah saiker telah mengikuti pendampingan pelaksanaan revisi dipa tahun 2020</p> <p>Jumlah saiker ditetapkan mengikuti pendampingan pelaksanaan revisi dipa tahun 2020</p> <p>Proporsi tahapan</p> <p>Jumlah saiker telah mengikuti pendampingan implementasi SAKTI Web Full Module (Modul Pelaksanaan dan Pelaporan)</p> <p>Jumlah saiker ditetapkan mengikuti pendampingan implementasi SAKTI Web Full Module (Modul Pelaksanaan dan Pelaporan)</p> <p>Proporsi Tahapan</p> <p>Jumlah saiker telah mengikuti pendampingan penyusunan DIPA TA 2021 (RSPP)</p> <p>Jumlah saiker ditetapkan mengikuti pendampingan penyusunan DIPA TA 2021 (RSPP)</p> <p>Proporsi Tahapan</p> <p>Jumlah saiker telah mengikuti publikasi tahap II implementasi SAKTI Web Full Module</p> <p>Jumlah saiker ditetapkan mengikuti publikasi tahap II implementasi SAKTI Web Full Module</p> <p>Proporsi Tahapan</p> <p>Persentase tingkat implementasi aplikasi SAKTI</p>	<p>N/A</p> <p>83</p> <p>83</p> <p>6%</p> <p>83</p> <p>83</p> <p>6%</p> <p>86</p> <p>86</p> <p>8%</p> <p>112</p> <p>112</p> <p>20%</p> <p>119</p> <p>119</p> <p>4%</p> <p>112</p> <p>112</p> <p>4%</p> <p>112</p> <p>112</p> <p>5%</p> <p>112</p> <p>112</p> <p>10%</p> <p>112</p> <p>112</p> <p>10%</p> <p>26</p> <p>26</p> <p>10%</p> <p>112</p> <p>112</p> <p>10%</p> <p>112</p> <p>112</p> <p>10%</p> <p>86</p> <p>86</p> <p>7%</p> <p>100,00%</p>	<p>Pengukuran tingkat pemuatan implementasi SAKTI tahun 2020, dilakukan melalui kriteria sebagai berikut :</p> <p>A. Pencapaian atas pelaksanaan porsi tahapan kegiatan yang telah ditetapkan untuk periode semester I dan II tahun 2020 secara tepat waktu, dan;</p> <p>B. Pencapaian atas jumlah saiker yang mengimplementasikan SAKTI tahun 2020 secara nasional</p> <p>Sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris DJPB Nomor ND-1137/PB.1/2020 tanggal 31 Maret 2020, capaian IKU ini untuk triwulan I tahun 2020 adalah N/A.</p> <p>Sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris DJPB Nomor ND-1907/PB.1/2020 tanggal 24 Juni 2020, trajectory dan perhitungan untuk IKU ini mengalami perubahan sebagaimana pada manual IKU</p> <p>Sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris DJPB Nomor ND-3000/PB.1/2020 tanggal 1 Oktober 2020, trajectory dan perhitungan untuk IKU ini mengalami perubahan sebagaimana pada manual IKU.</p>

NO	Periode	Kode IKU	Uraian IKU	Data yang diperlukan	Data	Keterangan
11	Triwulanan	7a-N	Persentase rekonstruksi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	Jumlah satker yang melakukan upload data ke E-Rekon secara tepat waktu (a) Jumlah satker yang memiliki nilai suspen (selisih) belanja tidak melebihi ambang batas suspen (b) Jumlah satker aktif pada periode berkenaan (c) Persentase rekonstruksi tingkat UAKPA	342 342 342 100%	Realisasi IKU dihitung berdasarkan : (1) Perbandingan jumlah satker yang melakukan rekonstruksi LK secara tepat waktu dengan jumlah satker yang wajib melakukan rekonstruksi LK (50%) (2) Perbandingan jumlah satker yang melakukan rekonstruksi LK secara andal dengan jumlah satker yang wajib melakukan rekonstruksi LK (50%).
12	Tahunan	8a-N	Nilai rata – rata hard competency pegawai KPPN	Jumlah nilai hasil tes hard competency Pegawai Jumlah pegawai KPPN yang mengikuti tes hard competency	2592 29	Formula penghitungan IKU = Jumlah nilai hasil tes hard competency pegawai / Jumlah pegawai yang mengikuti tes hard competency.
13	Tahunan	8b-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan	Nilai rata – rata hard competency pegawai KPPN	89,38	Hasil penilaian pelaksanaan tugas KI dari Kanwil DjPB
14	Tahunan	8c-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan Internal Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	88,28	Nilai hasil penilaian kualitas pengelolaan kinerja oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan
15	Tahunan	8d-N	Nilai rata-rata pelaksanaan LITERASI Perbendaharaan	Jumlah nilai literasi pejabat eselon IV KPPN Jumlah pejabat eselon IV KPPN	390 5	Untuk Kementer-Three KPPN, realisasi IKU tersebut diukur berdasarkan rata-rata nilai literasi yang dicapai oleh pejabat eselon IV di KPPN
16	Semesteran	9a-N	Persentase pengelolaan BMN yang optimal	Nilai rata-rata pelaksanaan LITERASI Perbendaharaan Hasil Monitoring dan Evaluasi pengelolaan BMN yang optimal oleh Kantor Pusat DjPB	100,00%	Pengukuran dilakukan oleh Kantor Pusat DjPB atas : 1. Keesuaian pelaksanaan RP4 2. Persentase completeness data master aset 3. Persentase PNBSP atas pengelolaan BMN 4. Persentase penyelesaian PSP atas penambahan jumlah BMN
17	Tahunan	9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	Total nilai berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh UAPPA-W dan UAPPB-W terhadap Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB	90,90	Penilaian dilakukan atas: Kelengkapan waktu penyampaian laporan keuangan, ketepatan data laporan keuangan, ketepatan pelaksanaan anggaran, Penyalinan Laporan Keuangan, Partisipasi dan Laporan BMN.
18	Triwulanan	9c-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	Revisi DIP A Devisi Halaman III DIP A Pagu Minus Data Kontrak Pengelolaan UP dan TUP LPJ Bendahara Dispensasi SPM Penyerapan Anggaran Penyelesaian Tagihan Konfirmasi Capaian Output Retur SP2D Renkas Kesalahan SPM KPPA Penyerapan Anggaran Konsistensi Capaian Keluaran Efisiensi EKA Realisasi IKU	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 90 99,41% 95,87 99,66 99,99 4,13 88,19% 92,88%	Sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-614/PB/2020, penilaian sebagaimana pada aplikasi OMS-PAN

Menyetujui,
Kepala Kanwil DjPB Prov. Jawa Timur

Dedi Sopandi
NIP 196204241982101001



Kepala KPPN Surabaya I
Bisakian Lesbri
NIP 197103211966032002

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI (NKO)
KPPN Surabaya I
Periode s.d. Triwulan IV Tahun 2020



No	Kode IKU	IKU	Target	Realisasi	Pol	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian IKU/NSS/INP
I Stakeholder Perspektif									
I Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel									
1	1a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	88	94,83	Max	PL	19%	40,43%	107,76%
2	1b-N	Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas	94	98,397	Max	PM	14%	29,79%	104,68%
3	1c-CP	Persentase akurasi perencanaan kas KPPN	80%	97,13%	Max	PM	14%	29,79%	120,00%
II Customer Perspektif									
2 Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien									
4	2a-N	Indeks kepuasan sakter terhadap layanan KPPN	4,55	4,64	Max	EM	21%	60,00%	101,98%
5	2b-N	Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	3	3,92	Max	PM	14%	40,00%	120,00%
III Internal Process (100%)									
3 Perumusan regulasi dan otorisasi yang optimal									
6	3a-N	Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99,40%	99,93%	Max	PM	14%	100,00%	100,53%
4 Komunikasi dan edukasi yang berkesinambungan									
7	4a-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	87	87,56	Max	PM	14%	100,00%	100,64%
5 Pengelolaan kas yang pruden dan optimal									
8	6a-N	Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	98%	100,00%	Max	PM	14%	100,00%	102,04%
6 Monev perbendaharaan									
9	6a-CP	Nilai Kinerja penyaluran DAK dan Dana Desa	80	99,92	Max	PM	14%	50,00%	120,00%
10	6b-CP	Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	100%	100%	Max	PM	14%	50,00%	100,00%
7 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara yang Akuntabel, Transparan, dan Tepat Waktu									
11	7a-N	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98,10%	100%	Max	PM	14%	100,00%	101,94%
IV Learning and Growth Perspektif									
8 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Optimal									
12	8a-N	Nilai rata-rata hard competency pegawai	77	89,38	Max	PM	14%	25,00%	116,08%
13	8b-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas keputuhan internal	80	90,87	Max	PM	14%	25,00%	113,59%
14	8c-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>strategy focused organization</i>	83	88,28	Max	PM	14%	25,00%	106,36%
15	8d-N	Nilai rata-rata pelaksanaan Literasi Perbendaharaan	74	78	Max	PM	14%	25,00%	105,41%
32,65%									



CAPAIAN KINERJA ORGANISASI (NKO)
KPPN Surabaya I
 Periode s.d. Triwulan IV Tahun 2020


No	Kode IKU	IKU	Target	Realisasi	Pol	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian IKU/NSS/Np
9	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal								107,29%
16	9a-N	Persentase Pengelolaan BMN yang optimal	92%	100,00%	Max	PM	14%	33,33%	108,70%
17	9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	81	90,90	Max	PM	14%	33,33%	112,22%
18	9b-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95%	95,90%	Max	PM	14%	33,33%	100,95%
NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)									107,56%

* Validitas/Tingkat Kontrol

Kepala Kanwil DJPB
 Provinsi Jawa Timur

Dedi Sopandi
 NIP 19620424 198210 1 001

Surabaya, 12 Januari 2021
 Kepala KPPN Surabaya I



Riskyati Lestari
 NIP 19710321 199603 2 002

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PERIODE SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LRASS
 Tanggal : 28-01-2021
 Halaman : 1
 Prog Id : lu_pastk

KEMENTERIAN / LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
 ESELON 1 : 08 DITJEN PERBENDAHARAAN
 WILAYAH PROVINSI : 1500 Kanwil XV Surabaya
 SATUAN KERJA : 527425 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SURABAYA I
 JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS DI (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				
A.I	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	0	7,206,810	7,206,810	-
A.I.1	Penerimaan Dalam Negeri	0	7,206,810	7,206,810	-
A.I.1.a	Pendapatan Perpajakan	0	0	0	-
A.I.1.b	Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	7,206,810	7,206,810	-
A.I.2	Hibah	0	0	0	-
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	7,206,810	7,206,810	-
B	BELANJA NEGARA				
B.I	BELANJA TRANSAKSI	1,985,951,000	1,903,973,238	(81,977,762)	95,87
B.I.1	Rupiah Murni	1,985,951,000	1,903,973,238	(81,977,762)	95,87
B.I.1.a	Belanja Pegawai	457,652,000	404,623,000	(53,029,000)	88,41
B.I.1.b	Belanja Barang	1,095,969,000	1,067,625,238	(28,343,762)	97,41
B.I.1.c	Belanja Modal	432,330,000	431,725,000	(605,000)	99,86
B.I.1.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	-
B.I.1.e	Subsidi	0	0	0	-
B.I.1.f	Hibah	0	0	0	-
B.I.1.g	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.I.1.h	Belanja Lain-Lain	0	0	0	-
B.I.2	Pinjaman dan Hibah	0	0	0	-
B.I.2.a	Belanja Pegawai	0	0	0	-
B.I.2.b	Belanja Barang	0	0	0	-
B.I.2.c	Belanja Modal	0	0	0	-
B.I.2.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	-
B.I.2.e	Subsidi	0	0	0	-
B.I.2.f	Hibah	0	0	0	-
B.I.2.g	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.I.2.h	Belanja Lain-Lain	0	0	0	-
	JUMLAH BELANJA NEGARA	1,985,951,000	1,903,973,238	(81,977,762)	95,87
C	PEMBIAYAAN				
C.I	PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	-
C.I.1	Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	-
C.I.2	Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	-
C.II	PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	-
C.II.1	Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	-
C.II.2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	-
	JUMLAH PEMBIAYAAN	0	0	0	-

**RENCANA KERJA TAHUNAN
KPPN SURABAYA I
TAHUN ANGGARAN 2020**

Lampiran
Notula Rapat Kepala KPPN Surabaya I
Tanggal 20 Januari 2020

No.	Uraian Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan	Unit Penanggung Jawab	Kebutuhan Dana	Indikator Kinerja
1	HARI BAKTI PERBENDAHARAAN 2020	Januari	Subbag Umum	28,791,000	
2	Sosialisasi PMK 178/PMK.05/2018 - Forum Komunikasi KPA - Penandatanganan Pakta Integritas oleh KPA Satker Mitra KPPN - Pemberian Apresiasi	Januari	Seksi MSKI		- Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L - Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu - Persentase akurasi rencana penarikan dana satker - Persentase akurasi penyaluran dana SP2D
3	Capacity Building	Februari, November	Subbag Umum	78,408,000	- Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization - Nilai rata-rata hard competency pegawai
4	Pelatihan Service Excellent	Maret	Subbag Umum	1,800,000	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN
5	GKM Kode Etik - Penandatanganan Pakta Integritas - Penandatanganan Komitmen	Januari	Seksi MSKI		Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN
6	Penandatanganan Kontrak Kinerja 2020	Januari	Subbag Umum		Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization
7	Pemberian Apresiasi kepada Pegawai "Best Employee"	Maret, Juni, September, Desember	Subbag Umum	1,000,000	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization
8	Monitoring Kepatuhan Bank Persepsi	Maret, Juni, September, Desember	Seksi Bank	7,040,000	Indeks kepatuhan satker terhadap pengelolaan rekening pemerintah
9	Monev DAK Fisik dan Dana Desa	Maret, Juni, September, Desember	Seksi Bank	4,640,000	Nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
10	Monev UMI (Bank, Penyalur, Debitur)	Maret, Juni, September, Desember	Seksi Bank	4,640,000	
11	Bimtek SAKTI	Juli	Seksi MSKI	28,791,000	
12	Sosialisasi Langkah - Langkah Akhir Tahun	Oktober	Seksi MSKI	28,791,000	- Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L - Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas - Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu - Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN secara andal dan tepat waktu - Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu - Persentase akurasi rencana penarikan dana satker - Persentase akurasi penyaluran dana SP2D - Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN
13	Pembinaan Satker	Maret, Juni, September, Desember	Seksi MSKI	12,624,000	- Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L - Persentase akurasi rencana penarikan dana satker
14	Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan	Juni, Desember	Seksi Vera	54,170,000	- Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas
15	FGD dengan Responden Survey Kepuasan Pengguna Layanan	Agustus	Seksi MSKI	7,120,000	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN
16	Dialog Kinerja Organisasi	Minggu ke-1 setiap bulan	Subbag Umum		Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization
17	Gugus Kendali Mutu	Minggu ke-1 dan ke-3 setiap bulan	Subbag Umum dan Seluruh Seksi		Semua IKU

**RENCANA KERJA TAHUNAN
KPPN SURABAYA I
TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	Uraian Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan	Unit Penanggung Jawab	Kebutuhan Dana	Indikator Kinerja
18	Kelas Pintar	Setiap bulan	Seksi MSKI, Seksi PD, Seksi Bank, Seksi Vera	5,000,000	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L - Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas - Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu - Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN secara andal dan tepat waktu - Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu - Persentase akurasi rencana penarikan dana satker - Persentase akurasi penyaluran dana SP2D - Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN


 Sifat: Bayar / 20 Januari 2020
 Kepala KPPN Surabaya I

KEPALA
 KANTOR PELAYANAN
 KEPADA
 FARRADIBAR ABDIA
 NIP. 19631210 198803 2 001